

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

(Studi Penelitian Kualitatif Deskriptif di Desa Wirokerten, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG STRARA 1 (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Pada hari : Jumat

Tanggal : 15 April 2016

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD”APMD”

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Hastowiyono, MS</u> Ketua Penguji/Pembimbing	_____
2. <u>Ir. Muhammad Barori, M.Si</u> Penguji Samping I	_____
3. <u>Drs. YB. Widyo Hari Mudianto, M.Si</u> Penguji Samping II	_____

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

MOTTO

Ya Allah, Tiada kemudahan kecuali Engkaulah yang buat mudah. Serta Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan). Jika Engkau mengendaki pasti akan menjadi mudah.

(Hadist)

Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, Jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Syukur dan Terimakasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Saya Persembahkan Karya Tulis Ini

Kepada :

Orang tua saya tercinta H.DomyadiA.Rachim (ayah) yang selalu saya
banggakan. Terimakasih atas semua pengorbanannya selama ini yang tidak
pernah mengenal lelah untuk memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan saya
selama kuliah.

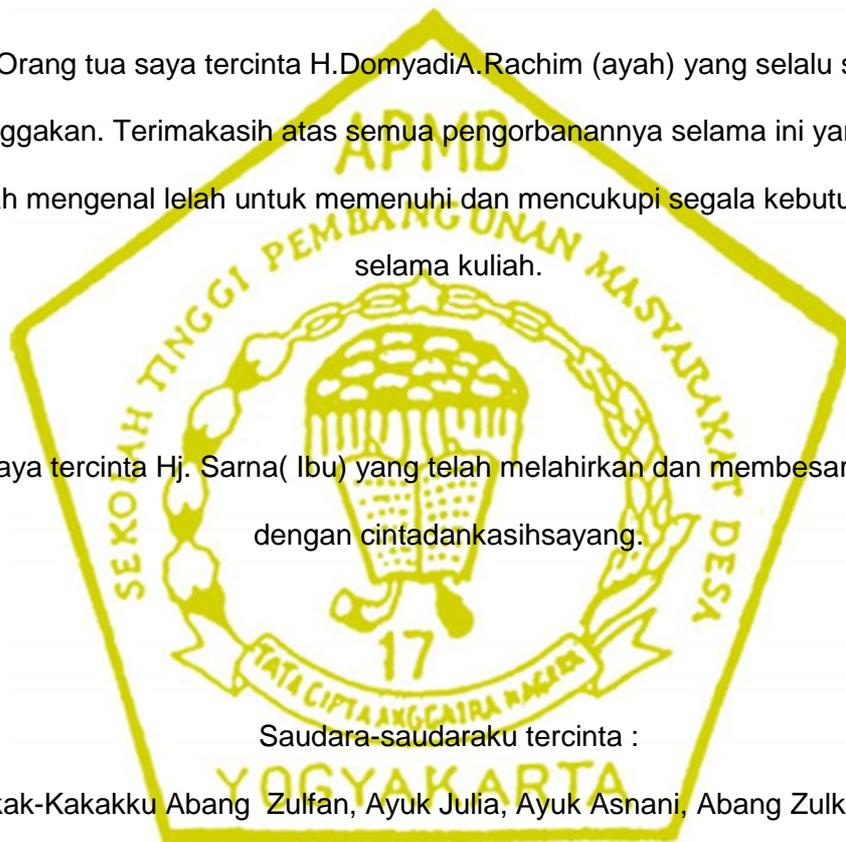
Ibu saya tercinta Hj. Sarna(Ibu) yang telah melahirkan dan membesarkan saya
dengan cintadankasihsayang.

Saudara-saudaraku tercinta :

Kakak-Kakakku Abang Zulfan, Ayuk Julia, Ayuk Asnani, Abang Zulkarnaen,
Abang Kiki serta Kakak-Kakak Ipar Ku, Mbak Dian, Abang Erwanto, Abang Heri,
RelaSumira, Terimakasih atas semua dukungan kalian, semangat dan motivasi
yang telah membuatku kuat dalam menyelesaikan kuliah dan karya ilmiah ini.

Dan tidak lupa juga kepada keponakan ku Rezilia, Adel, Fiqran, Cinta, Livia,

Zhafira, Daffa.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul “ **Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa** ”

Dalam segala kehidupan manusia yang cenderung mengalami keterbatasan dan kekurangan apalagi sebuah kesalahan, dan begitu pula halnya penulis juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Hastowiyono, M.S. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah banyak memberikan bimbingan.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin untuk penelitian ini di Desa Wirokerten.

7. Seluruh jajaran Pemerintah Desa Wirokerten, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu-Ibu serta Masyarakat Desa Wirokerten yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa STPMD"APMD" angkatan tahun 2012 yang telah banyak membantu dan memberi semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Antara lain : Adil, Nita,Nurul, Fritz, Ayu,Yoan, dll.
10. Saudaraku Dedek yang telah banyak membantu, serta memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Kost Krimastoro Vina, Ridha, Maya, Mbak Ella, Mbak Ismi, Mbak Junia, Kiki, Nadya, Citra, Yulia yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman Forum Kreatifitas Mahasiswa Bangka Tengah" FORKREVMAH" yang telah banyak memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besarku, Kelurga Besar A.Rachim yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata, peneliti hanya manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Begitu pula dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih sangat banyak kekurangannya. Untuk itu, peneliti mengharapkan suatu kritik dan saran yang membangun demi kebaikan di masa mendatang. Akhir

kata, besar harapan peneliti agar karya yang tak seberapa ini dapat berguna bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam hasil penelitian ini .Amin.

Yogyakarta, 15 April 2016

Penyusun

WINI YULIANTI

DAFTAR ISI

Halaman Judul -----	i
Halaman Pengesahan -----	ii
Halaman Motto -----	iii
Halaman Persembahan -----	iv
Kata Pengantar -----	v
Daftar isi -----	viii
Daftar Tabel-----	xi
Daftar Gambar -----	xi
Intisari -----	xii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Manfaat Penelitian -----	9
E. Kerangka Konseptual -----	9
E.1. GENDER -----	9
E.2 . Pembangunan Desa -----	11
E.2.1 Desa -----	11
E.2.2. Kedudukan Desa -----	12
E.2.3. Kewenangan Desa-----	13
E.2.4. Pembangunan -----	14
E.2.4. RPJMDes -----	16

F. Ruang Lingkup Penelitian-----	26
G. Metode Penelitian-----	26
G.1. Jenis Penelitian -----	26
G.2. Subjek Penelitian -----	27
G.3. Teknik Pengumpulan Data -----	28
G.4. Teknik Analisis Data -----	29
BAB II PROFIL DESA WIROKERTEN -----	31
A. Sejarah Desa Wirokerten -----	31
B. Data Umum-----	32
B.1. Tipologi desa-----	33
B.2. Luas dan Batas Wilayah -----	33
C. Demografi-----	34
C.1. Jumlah Penduduk -----	34
C.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur-----	35
C.3. Penduduk Menurut Agama -----	35
C.4. Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk-----	36
C.4. Tingkat Pendidikan Penduduk-----	37
D. Sarana dan Prasarana-----	39
D.1. Prasarana Kesehatan -----	39
D.2. Prasarana dan Prasarana Pendidikan-----	40
D.3. Prasarana Ibadah-----	40
D.4. Prasarana Umum-----	41
E. Sosial Budaya -----	42
F. Lembaga Pemerintah Desa -----	42
G. Badan Permusyawaratan Desa -----	44
H. Lembaga Kemasyarakatan Desa -----	46
H.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) -----	46

H.2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wirokerten -----	47
H.3. Karang Taruna Desa Wirokerten -----	49
H.4. Rukun Tetangga -----	52
BAB III ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN	
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA-----	53
1. KETERLIBATAN PEREMPUAN DI DALAM TIM PENYUSUN-----	54
2. KETERLIBATAN PEREMPUAN DI DALAM PENGKAJIAN KEADAAN DESA-----	60
3. KETERLIBATAN PEREMPUAN DI DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN MELALUI MUSYAWARAH DESA -----	65
4. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG-----	70
5. KENDALA PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RPJMDES-----	81
BAB IV PENUTUP -----	83
A. Kesimpulan-----	83
B. Saran -----	84

Daftar Tabel

Tabel II.1. Jumlah Penduduk Desa Wirokerten	
Menurut Jenis Kelamin -----	34
Tabel II.2. Susunan Jumlah Penduduk Menurut Usia -----	35
Tabel II.3. Penduduk Menurut Agama -----	36
Tabel II.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian -----	37
Tabel II.5. Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan -----	38
Tabel II.6. Sarana dan Prasarana Kesehatan -----	39
Tabel II.7. Sarana dan Prasarana Pendidikan -----	40
Tabel II.8. Sarana dan Prasarana Peribadatan -----	40
Tabel II.9. Sarana dan Prasarana Umum -----	41

Daftar Gambar

Gambar I.1. Alur Penyusunan RPJMDes -----	20
Gambar II.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wirokerten -----	43
Gambar II.2. Bagan Struktur Organisasi BPD Wirokerten -----	45
Gambar II.3. Bagan Struktur Organisasi LPMD Wirokerten -----	47
Gambar II.4. Bagan Struktur Organisasi TP PKK Desa Wirokerten -----	49
Gambar II.5. Bagan Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Wirokerten -----	51
Gambar II.6 Bagan Struktur RT Wirokerten -----	52

Daftar Pustaka

Interview Guide

Lampiran-lampiran

INTISARI

Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. seperti yang telah dijelaskan Pemendagri No 114 Tahun 2014 di dalam kegiatan penyusunan RPJMDes harus melibatkan perempuan, selain itu penelitian ini ingin mengetahui sejauhmana keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJMDes dengan kepala Desa seorang Perempuan.

Adapun penulis mengambil rumusan masalah adalah Bagaimana Peran Perempuan dalam penyusunan RPJMDes. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana peran perempuan dalam penyusunan RPJMDes, serta kendala-kendala yang di hadapi perempuan. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, pengamatan dan dokumentasi dengan informan 17 orang. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, LPMD, Kepala Dukuh, Kelompok Perempuan, Masyarakat Umum.. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana teknik ini mencoba menggambarkan temuan-temuan yang diamati pada saat peneliti.

Hasil dari penelitian yang diperoleh, dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keterlibatan perempuan di Desa Wirokerten memang dilibatkan. Hal ini dibuktikan dengan perempuan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. hanya saja yang menjadi kendala perempuan-perempuan yang ada di Desa Wirokerten terkait waktu, terkadang pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan jangka menengah Desa diadakan malam hari, hal ini yang menjadi kendala perempuan-perempuan yang di Desa Wirokerten karena mereka dihadapi oleh dua pilihan, antara mengikuti rapat atau menunggu anak dirumah.

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

(Studi Penelitian Kualitatif Deskriptif di Desa, Wirokerten Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

WINI YULIANTI
12520087

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keadilan dan kesetaraan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Upaya mewujudkan hal itu tertuang dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1998, bahwa wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insanya pembangunan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang dan tingkatan. Maka bangsa indonesia perlu menyadari untuk memperbaiki segala urusan yang menyangkut kepentingan, apalagi di tinjau dari struktur demografi, wanita menempati jumlah yang cukup besar dan ini merupakan potensi dalam pembangunan politik yang sangat kuantitatif amat menentukan.

Di indonesia sendiri gagasan gender sudah sejak 1912 yang ditandai dengan lahirnya organisasi poetry mardika yang mempraksarsi pendidikan bagi kaum wanita, dan pada tahun 1815 putry mardika mengajukan misi pada gubernur jenderal pria dan wanita diperlakukan sama. Menyertakan wanita di perdesaan dalam proses pembangunan bukan lah berarti hanya sebagai suatu tindakan perikemanusiaan yang adil. Tindakan berupa mengajak, mendorong wanita di perdesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu tindakan yang efisien. Bukankah ikut sertanya wanita pada umunya dalam pembangunan berarti pula memanfaatkan suatu sumber daya manusia dengan potensi yang tinggi.

Kemungkinan tanpa mengikuti sertakan wanita dalam pembangunan akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap lajunya pembangunan kita.

Mengerti masalah wanita akan membantu kita pula untuk mengisi arti dari pada “pembangunan” yaitu jika pembangunan dirumuskan sebagai suatu proses dimana insan-insan Pria dan Wanita yang menjadi sasaran pembangunan seyogyanya berpartisipasi ‘sama nilai” (*equally*) dalam proses tersebut. Kemudian proses itu sendiri seyogyanya pula ditunjukkan pada pembangunan yang terpadu, dan bukan merupakan suatu tipe pembangunan yang akan mengembangkan suatu bidang dan golongan dan baru kemudian akan mempengaruhi bidang atau golongan lainnya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional agar menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia atau dengan kata lain Sumber Daya Manusia(SDM) berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali , mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangun tercapai. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu juga diperlukan kebijakan Pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi angin segar untuk seluruh Desa yang ada di Indonesia. Pembangunan di Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas beberapa program atau kegiatan dan sebagainya yang nantinya Pembangunan Desa akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di setiap Desa. Hal ini sebagaimana dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif dalam pembangunan.

Berbicara tentang Pembangunan Desa maka semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan berhak ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Karena semua dituntut untuk terlibat berpartisipasi dalam pembangunan tanpa ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Terkadang diperdesaan segala urusan diluar rumah apalagi tentang pembangunan lebih banyak dilakukan oleh kaum lelaki.

Dari hasil penelitian *United Nations Statistic Division* di Indonesia jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki. Seharusnya kaum perempuan diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menyertakan wanita di pedesaan dalam proses pembangunan bukan berarti hanya sebagai suatu tindakan perikemanusiaan yang adil. Tindakan berupa mengajak, mendorong wanita di pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu tindakan yang efisien. Bukankah ikut sertanya wanita pada umumnya dalam pembangunan berarti pula memanfaatkan suatu sumber manusia yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan *United Nations Statistic Division* menunjukkan bahwa di Indonesia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Kemungkinan tanpa mengikutsertakan wanita dalam pembangunan akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap lajunya pembangunan kita. Pengaruh negatif jika perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan, perempuan akan berpikir tugas perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga yang tugasnya hanya mengurus anak, mengurus suami bahkan mengurus rumah tangga dan akan berpikir tidak akan bisa melakukan tugas di luar rumah bahkan sampai ikut terlibat dalam urusan pembangunan, padahal tidak menutup kemungkinan kaum perempuan juga bisa melakukannya.

Jika memperhatikan peran perempuan dalam keluarga, maka nampaklah bahwa perbedaan posisi laki-laki dan wanita dalam keluarga hanya disebabkan oleh alasan-alasan biologis: seperti fisik kuat atau lemah, sebagian lagi disebabkan karena perbedaan sosial dan budaya lingkungan keluarga itu.

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom, Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asas berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan hak yang dimiliki manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.

Di desa wanita sering kali di anggap lemah tidak bisa memberikan peran apa-apa dalam pembangunan, wanita biasanya lebih sering hanya melakukan pekerjaan di rumah, wanita tidak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi baik dalam pembangunan maupun dalam kebijakan Desa. Terkadang wanita hanya diberikan tugas untuk menjadi ibu rumah tangga, tanpa harus terlibat dalam pengambilan kebijakan ini sering kali membuat wanita seakan-akan tidak bisa berpartisipasi di desa. Partisipasi mereka masih kurang, selama ini masih di dominasi oleh kaum laki-laki, yang mereka menganggap wanita tidak akan bisa ikut berpartisipasi di desa. Padahal bila keluarga mendukung perempuan bisa ikut serta dalam pembangunan dengan salah satu cara yaitu bekerja di Pemerintahan atau ikut serta dalam

pengambilan kebijakan di desa karena dengan demikian perempuan di tuntut untuk berkerja secara profesional dan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mewakili dari aspirasi perempuan.

Berbicara tentang pembangunan salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait perencanaan pembangunan Desa yang salah satunya melalui RPJMDes atau rencana pembangunan jangka menengah Desa, RPJMDes adalah dokumen yang menunjukkan arah pembanguna selama enam tahun yang akan datang sesuai masa jabatan kepala Desa.

Tujuan RPJMDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 pasal 2 Bahwa : (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota, (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan atau pihak ketiga, (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di wilayahnya.

Pada pasal 25 (Ayat 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa, (Ayat 2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat, ayat (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : (a) tokoh adat, (b) tokoh agama, (c) tokoh masyarakat, (d) tokoh pendidikan, (e) perwakilan kelompok tani, (f) perwakilan kelompok nelayan, (g) perwakilan kelompok perajin, (h) perwakilan kelompok perempuan, (i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan (j) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan penyusunan program pembangunan enam tahunan atau selama masa jabatan kepala desa sesuai dengan pemendagri nomor 114 tahun 2014, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa serta melibatkan seluruh masyarakat di Desa dan unsure lembaga Desa lainnya.

Kajian penelitian ini diarahkan pada keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJMDes sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat sendiri, karena masyarakat yang lebih tahu masalah dan potensi-potensi yang ada di desa melalui musyawarah pembangunan (musrenbang) dan dimuatkan dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes.

Pada observasi awal peneliti datang ke Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Peneliti melihat Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa seorang perempuan. Selama ini kebanyakan jabatan Kepala desa dipimpin oleh laki-laki. Hal ini yang menarik perhatian peneliti ingin meneliti di Desa Wirokerten, Karena peneliti ingin mengetahui seperti apa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Dengan kepala desa seorang perempuan, apakah mempengaruhi keterlibatan perempuan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Keterlibatan Perempuan dalam penyusunan RPJMDes”. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang saya angkat adalah:

Bagaimana Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan RPJMDes?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana Peran Perempuan dalam penyusunan RPJMDes di perdesaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi perempuan dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah Desa Wirokerten, hasil Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bahkan rujukan dalam penyusunan RPJMDes periode berikutnya agar perempuan bisa lebih berperan dalam penyusunan RPJMDes.
2. Bagi masyarakat desa, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi agar peran perempuan di perdesaan khususnya dalam penyusunan RPJMDes lebih meningkat dari sebelumnya.
3. Bagi mahasiswa, melalui penelitian ini memperoleh pengetahuan tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan di perdesaan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

E.1. GENDER

Membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut: Pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalaan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan sosial. Maka sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan social lainnya. (*Fakih, Mansour. Dr 1996*)

Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan social dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. (Fakih, Mansour. Dr 1996:)

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender. Dari pengamatan, masih terjadi ketidaklaksanaan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan setidaknya-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian sex dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks(jenis kelamin) pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan ataupun pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalkan laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim,memproduksi telur dan mempunyai alat menyusui. Sedangkan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang konstruksi secara social maupun kultur. Misalnya Perempuan itu cantik, lemah lembut, dan keibuan.(Fakih, Mansour. Dr 1996:7)

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis.Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminis adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Gender adalah

seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminis atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya. (Julia Cleves Mosse,2007:3).

Dari penjelasan mengenai pengertian gender menurut para pakar di atas menegaskan bahwa gender merupakan kata yang menyebutkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan biologis itu kata yang menyatakan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki.

Sebagai warga Negara yang baik setiap Perencanaan Pembangunan harus melibatkan semua unsur baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan harus dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes karena di dalam Permendagri No 114 Tahun 2014, jelas memberikan perhatian khusus terhadap perempuan untuk ikut terlibat dalam penyusunan RPJMDes, keterlibatan perempuan sangat diharapkan dalam penyusunan RPJMDes agar di dalam pelaksanaan jelas memberikan ruang kepada seluruh unsur masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan RPJMDes, agar dalam penyusunan yang dilaksanakan bersifat demokratis dan partisipatif.

E.2. Pembangunan Desa

E.2.1 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

E.2.2. Kedudukan Desa

Pengaturan tentang kedudukan desa menjadi desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang sebelumnya sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar Desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. Konstruksi pemerintahan Desa yang dianut dalam Undang-Undang Desa menyebutkan secara tegas “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa adat”. Ringkasnya, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan control/pengendalian Negara terhadap Desa dan menempatkan Desa sebagai subyek Pembangunan. (Muhammad Yasin dkk, 2015:42).

Kedudukan Desa dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bagian dari kompromi atas perdebatan pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara Negara dengan desa setelah didudukan, dimana Negara tidak lagi

mengontrol desa secara penuh tapi harus memosisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri.(Muhammad Yasin dkk,2015,42).

E.2.3. Kewenangan Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Jika Desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau “hak milik” desa. Namun demikian konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas “hak milik” tersebut. Mengurus dalam hal ini berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa atau bisa juga disebut “ hak kelola” desa.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditunjukkan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintah pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan public (*public good*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan dan lain-lainnya. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengemangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Menurut pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi : (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul; (2) Kewenangan lokal berskala Desa; (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; (4) Kabupaten/Kota; dan (5) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah. (Sutoro Eko,2014:91)

E.2.4. Pembangunan

Menurut Rogers Pembangunan adalah suatu proses perubahan social dengan partisipator yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksud untuk kemajuan social material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Nasution, Zulkarien, 2007).

Menurut Kleinjans (dalam buku Nasution, Zulkarien, 2007) pengertian pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasaan wawasan manusia, tumbuh nya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kpercayaan diri. (Nasution, Zulkarien, 2007).

Sedikitnya ada dua alasan mengapa masalah pembangunan masyarakat desa masih relevan dibahas. *Pertama*, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah Negara kita masih didominasi oleh daerah perdesaan, Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relative lama. *Kedua*, kendati sejak awal tahun 1970-an pemerintah Orde Baru telah merencanakan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan perdesaan yang ditandai oleh informasi teknologi modern, secara

umum kondisi sosial ekonomi desa masih memperhatikan. Betul bahwa pemerintah Orde Baru telah sukses menghantarkan Indonesia dari salah satu Negara pengimpor beras nomor wahid di dunia menjadi Negara berswasembada beras, dan konflik-konflik social yang berakar dan kompetensi memenuhi *the basic needs*(pangan, sandang, papan dan kesehatan) di perdesaan hampir tidak lagi terdengar sehingga seperti dinyatakan sejumlah pakar strategi pembangunan di perdesaan yang kita pilih sudah menapak pada jalan yang benar. Namun demikian , persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah Desa. Persoalan ini tidak dapat diabaikan karena bisa menjadi pemicu berbagai konflik politik atau gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan karena itu, persoalan ini harus terus dicarikan alternative pemecahaan supaya tidak mengganggu stabilitas. (Usman,1998)

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin kini dan termiskin di perdesaan masih cukup banyak, (Usman,1998). Mereka jadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur perdesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (*the absolute poor*). Kondisi ini sungguh memperhatikan, antara lain, ditandai oleh tingkat pendidikan yang rendah, bahkan masih banyak yang buta huruf. Sementara itu sisanya memiliki kondisi yang agak lebih baik dari pada kelompok dalam kategori sangat miskin (*the absolute poor*) itu, meskipun tentu saja tetap berkategori miskin, yang ini masih belum mempunyai pendapatan yang cukup untuk bebas dari kekurangan. Mereka masih dilihat oleh ketidaklayakan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk mengubah kehidupan mereka lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga

mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi(sekaligus politik).
(Usman,1998: 29)

Adapun Tujuan Pembangunan terbagi atas 2 bagian, yaitu : 1.Tujuan Umum Pembangunan adalah sutau proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. 2. Tujuan Khusus Pembangunanialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari satu program tertentu. (Zulkarien Nasution, 2007)

Dari pengertian pembangunan yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik, karena setiap proses yang dilakukan diharapkan menghasilkan kearah yang lebih baik.

E.3. RPJMDes

Menurut Widjojo Nitisastro:

Perencanaan adalah suatu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan” (Bintoro Tjokroamidjojo, 1990:14).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, perencanaan adalah:

- a. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu terdapat pada setiap jenis usaha manusia.

- b. Suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya efisien dan efektif.
- c. Suatu penentuan tujuan yang akan dicapai bagaimana, bilamana dan oleh siapa.
- d. Suatu pengarahan penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas, adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial, ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif (Bintoro Tjokroamidjojo, 1990:14).

Pembangunan yang hendak dijalankan melalui perencanaan mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan tujuan dan sasaran;
- b. inventasi, penelitian, survey-survei;
- c. penyusunan rencana;
- d. pengesahaan rencana;
- e. pelaksanaan rencana;
- f. evaluasi (sesudah pelaksanaan)

“Obyek perencanaan” adalah suatu wilayah (termasuk penduduknya) yang merupakan bagian suatu Negara dan di bawah wewenang pemerintahannya; sedangkan “subjek perencanaan” adalah organisasi pemerintah atau sekelompok para ahli yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan dan menyusun suatu rencana. Tujuan perencanaan ialah merumuskan program-program tindakan yang akan menggerakkan proses pembangunan selanjutnya, atau yang akan memulai proses-proses baru yang akan merubah situasi yang ada sedemikian rupa, sehingga pada suatu saat tertentu dalam waktu yang akan datang (yaitu di akhir periode rencana yang bersangkutan) tercapailah situasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan

dan sasaran-sasaran yang telah dirumuskan pada saat rencana tersebut dirancang dan disusun.(fransiskus xaverius).

Dari pengertian perencanaan yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Perencanaan merupakan suatu perumusan tujuan usaha, prosedur, metode dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6(enam) tahun sesuai jabatan kepala Desa menurut (Pemendagri No. 114 tahun 2014 tentang RPJMDes). Memuat RPjMDes arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMDes, program satuan kerja perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. Forum perencanaan disebut musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Terdapat dua dokumen rancangan desa yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan disusun mulai oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDes, yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana pembangunan jangka menengah dibuat melalui Proses musrenbang yang melibatkan semua pihak di Desa. Sehingga musrenbang harus mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialog. Pada saat musrenbang dilakukan semua diharapkan memberikan suara dan ikut terlibat,

tidak menutup kemungkinan, keterlibatan perempuan juga sangat diperlukan 30% dari jumlah yang hadir di dalam forum musrenbang, sehingga itu menunjukkan bahwa pembangunan di desa itu sangat partisipatif karena melibatkan semua unsur-unsur yang ada di desa.

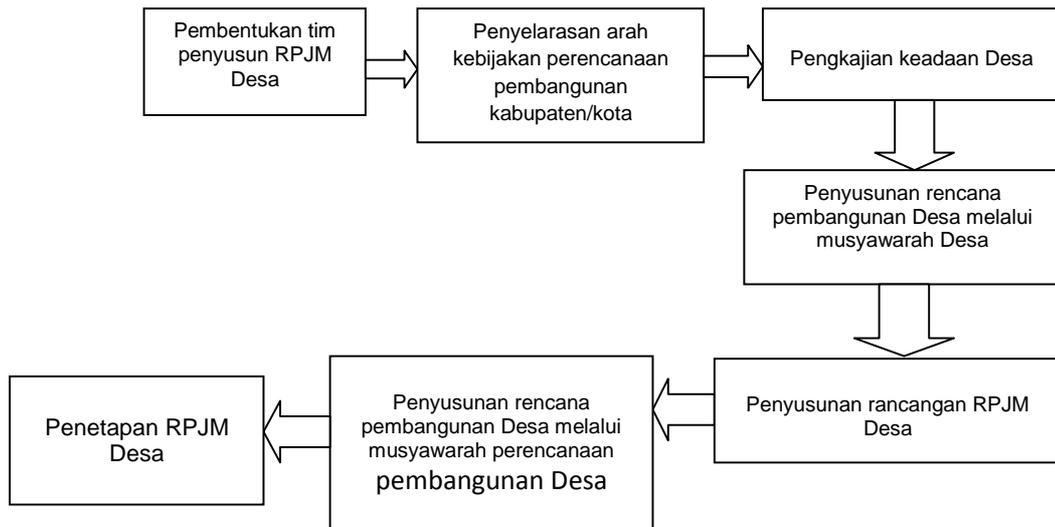
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 pasal 8 ayat 4 mengatakan tim penyusun RPJMDes harus mengikutsertakan Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan RPJMDes keterlibatan perempuan diwajibkan, karena di dalam menyusun RPJMD semua pihak harus dilibatkan, agar dalam penyelenggaraan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis.

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih yang di tuangkan menjadi visi dan misi desa, sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 Hubungan antara RPJMD kabupaten dan RPJM harus terkonsolidasi satu sama lain. Dalam arti RPJM Desa harus mencakup pada program prioritas dan visi misi daerah, RPJMD Kabupaten harus mau menjadi RPJM Desa sebagai acuan penyusunan RPJMD. Sehingga dicapai arah kebijakan pembangunan yang saling mendukung, karena pendekatan dari bawah bertemu dengan arah kebijakan pembangunan yang diinisiasi dari atas.

Gambar. I.1

Alur Penyusunan RPJM Desa



Sumber :<http://www.keuangandes.com> 2013/04/18-penyusunan-RPJMD-Desa.PDF

Berdasarkan bagan tersebut tahapan penyusunan RPJMDes dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa, Tim terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina;
2. Sekretaris Desa selaku ketua;
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris ; dan
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat kader pemberdayaa.

Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11(sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten atau Kota;
2. Pengkajian Keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJMDesa;
4. Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota.

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota;
2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3. Rencanan umum tata wilayah kabupaten atau kota;
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota;
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau Kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan desa. Hasil pendataan dan pemilahaan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajiaan keadaan Desa.

c. Pengkajian Keadaan Desa;

Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan berikut:

1. Penyelarasan Data Desa

a. Pengambilan data meliputi:

Data SDA

Data SDM

Data Sumber Daya Pembangunan

b. Perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

2. Penggalan Gagasan Masyarakat

a. Menemukan kembali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi desa.

b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat desa yang dilakukan mulai musyawarah dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

3. Menyusun berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, dengan dilampirkan dokumen:

a. Data desa yang sudah diselaraskan

b. Data rencana program pembangunan kabupaten atau kota yang masuk ke desa

- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa di dusun dan kelompok

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Pembahasan rencana prioritas dilakukan dengan diskusi kelompok untuk membahas sebagai berikut :
 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
 2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu enam tahun
 3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
 4. Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsure masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes.

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;

Penyusunan rancangan RPJM desa di mulai dengan :

1. Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
2. Rancangan RPJM Desa membuat berita acara hasil penyusunan.
3. Tim penyusun RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM.
4. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.
5. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim penyusun RPJM Desa.
6. Tim penyusun desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
7. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa dan dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsure masyarakat.

Unsur masyarakat diatas terdiri dari:

1. Tokoh adat;
2. Tokoh agama;
3. Tokoh masyarakat;
4. Tokoh pendidikan;

5. Perwakilan kelompok tani;
6. Perwakilan kelompok nelayan;
7. Perwakilan kelompok perajin;
8. Perwakilan kelompok perempuan;
9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk membahas, menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.

g. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

1. Penetapan RPJM Desa

Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

2. Perubahan RPJM Desa

Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan social yang berkepanjangan.

- b. Terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini lingkup Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan RPJMDes meliputi:

1. Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan RPJMDes.
2. Kendala Perempuan dalam penyusunan RPJMDes.

G. Metode Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara ilmiah. Di dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai inti dari permasalahan yang akan diteliti. Supaya dapat memperoleh data relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti metode penelitian ini mempunyai peran penting. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian tersebut terdapat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan suatu penelitian mulai dari penelitian dan penetapan fokus penelitian sampai dengan cara menganalisis data yang diperoleh.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong(2002:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu penelitian dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak mengungkapkan hipotesis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan social yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan objek penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode kualitatif seperti dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam (Moleong 2001:3) adalah sebagai berikut; "Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu secara holistic(utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan-temuan yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat populasi di daerah tertentu.

G.2. Subjek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka objek penelitian adalah keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Wirokerten. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Kelompok Perempuan

3. Perangkat Desa Perempuan
4. Masyarakat umum (ibu-ibu yang bukan pengurus kelompok Perempuan)

G.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi bisa diartikan sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. (Eko Putro Widoyo, 2012; 46)

Hasil pengamatan peneliti selama penelitian adalah sebagai berikut :

1. kelompok ibu-ibu di Desa Wirokerten memang aktif terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan
2. Kelompok Perempuan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa.

Dari uraian observasi diatas, menunjukkan dan membuktikan bahwa kelompok perempuan atau unsur dari perempuan selalu aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di Desa. Demikian juga halnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJMDES.

b. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan bermaksud

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu. (Moleong,2013:186)

Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJMDes.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Dokumentasi berupa data sekunder yang berwujud surat, arsip-arsip, buku, catatan-catatan harian, jurnal, laporan-laporan, serta artikel-artikel atau makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang dapat diperoleh melalui dengan jalan melihat, mencatat dan mengambil gambar. Dokumentasi sudah lama digunakan digunakan untuk penelitian sebagaimana sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsikan bahkan untuk meramaikan.

Dokumen yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian yaitu Monografi Desa, daftar tim penyusun RPJMDes Desa Wirokerten.

G.4. Teknik Analisis Data

Menurut Paton, analisis data ialah proses mengatur urusan data. Mengorganisir ke dalam suatu pola, katagori uraian dasar yang membedahkan dengan penelitian, yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, penjelasan uraian-uraian data mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.(Moleong,2001:103)

Untuk menganalisis data, maka penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif, artinya suatu data yang dianalisis dengan tidak menggunakan data statistic, namun hanya mencoba menggambarkan dan menguraikan hasil dari penelitian. Dalam menganalisis data, penyusunan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini:

a. Pengumpulan data

Penyusun mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

b. Penilaian data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diteliti dengan memperhatikan prinsip validasi, sehingga data yang relevan saja yang akan digunakan.

c. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

d. Penarikan Simpulan/ Verifikasi data, yaitu langka terakhir dari analisis data. Dalam penarikan simpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB II

PROFIL DESA WIROKERTEN

A. Sejarah Desa Wirokerten

Desa Wirokerten dibentuk pada 9 Desember 1949, nama Wirokerten berasal dari rasa ingin mengenang seorang tokoh yang dianggap oleh masyarakat sebagai seorang pemberani dan berjuang semata-mata untuk kejayaan Kerajaan Mataram pada waktu itu. Tokoh tersebut adalah *Tumenggung Wirokerti*. Beliau merupakan komandan pasukan perang Sultan Agung. Sehingga untuk menghormati jasa-jasa Tumenggung Wirokerti yang pemberani tersebut, maka nama "Wirokerten" dari asal kata "*Wirokerti*", dipakai sebagai nama Desa ini sampai sekarang.

Sejarah Pembentukan Desa Wirokerten pada awalnya terdiri dari 4 kelurahan :

1. Kelurahan Mutihan dengan Lurah Prawiro Darso
2. Kelurahan Banjarsari dengan Lurah Wongso Wiharjo
3. Kelurahan Tobrutan dengan Lurah Kromo Arjo
4. Kelurahan Batutirto dengan Lurah Dolan Hadi

Dari 4 kelurahan tersebut, pada tanggal 9 Desember 1949 digabung menjadi satu dengan nama Desa Wirokerten dengan susunan perangkat desa sebagai berikut :

Lurah	: Prawiro Sudarno (Kelurahan Batutiro)
Carik	: Midarjo (Kelurahan Tobratan)
Keamanan	: Darto Supadmo (Kelurahan Batutito)

Sosial :Dwijo Sumarto
(Kelurahan Batutirto)

Kemakmuran : Zawawi
(Kelurahan Banjarsari)

Kesra : Cokro Sudarmo
(Kelurahan Mutihan)

Nama-nama 6 orang tersebut adalah cikal bakal Pamong Desa Wirokerten pertama dengan balai desa bertempat di rumah Bapak Prawiro Sudarno di Kelurahan Batutirto atau sekarang terletak di Padukuhan Kapuh Kulon dimana balai desa tersebut dibangun secara sederhana dan telah dilengkapi lapangan Desa.

Dalam perkembangan selanjutnya Komplek perkantoran Balai Desa Wirokerten mengalami renovasi dengan dilengkapi gedung Pemerintah Desa, gedung kelembagaan Desa dan Gedung serbaguna “Sasana Krida Wiratama” yang biasa digunakan untuk kegiatan olahraga, acara pertemuan desa dan acara resepsi pernikahan masyarakat. Selain itu di dalam komplek balai Desa Wirokerten juga terdapat mushola, ruang FKPM, kantor BKM, kantor LKM-PUAP, perpustakaan desa, gedung PKK, puskesmas pembantu, TK Pertiwi 25 serta SDN Wirokerten. Setelah perkembangan Desa wirokerten mempunyai 8 padukuhan sampai dengan sekarang.

B. Data Umum

B.1. Tipologi Desa : a.Persawahan
b. Perladangan
c. Perkebunan
d. Pertenakan
e. Nelayan

- f. Pertambangan/ galian
- g. Kerajinan dan Industri Kecil
- h. Industri sedang dan besar
- i. Jasa dan Perdagangan

Desa Wirokerten masuk tipologi jenis persawahan, dengan luas sawah 255,75 Ha dari jumlah luas wilayah Desa Wirokerten. Artinya Desa Wirokerten termasuk di dalam jenis tipologi persawahan.

B.2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Wirokerten adalah 386.1655 Ha

Dan Batas Wilayah Desa Wirokerten terdiri dari :

- Sebelah Utara : Desa Singosaren
- Sebelah Selatan : Desa Pleret
- Sebelah Barat : Desa Tamanan
- Sebelah Timur : Desa Jambidan

B.3. Orbitrasi

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 2 Km
- 2) Jarak dari kota/ibukota Kabupaten : 15 Km
- 3) Jarak dari Ibukota Provinsi : 7 Km

B.4. Pembagian Wilayah Padukuhan

Secara administrasi, wilayah Desa Wirokerten dibagi menjadi Padukuhan, yang terdiri dari :

- 1. Padukuhan Grojogan

2. Padukuhan Boto Kenceng
3. Padukuhan Sampangan
4. Padukuhan Wirokerten
5. Padukuhan Kepoh Wetan
6. Padukuhan Kepoh Kulon
7. Padukuhan Glondong Kerto Paten
8. Padukuhan Mutihan

C. Demografi

C.1. Jumlah Penduduk

Desa Wirokerten terdiri dari 3.322 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 12.986 Jiwa yang terdiri dari 6.501 jiwa penduduk laki-laki dan 6.485 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut dipaparkan secara lengkap dalam Tabel di bawah ini :

Tabel. II.1

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	6.501	50.07
2.	Perempuan	6.485	49.93
Jumlah		12.986	100,00

Sumber : *Monografi Desa Wirokerten Tahun 2015*

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk laki-laki 50,07% sedangkan jumlah penduduk perempuan 49.93%, dari jumlah persentasi diatas dapat kita lihat bahwa penduduk Desa

Wirokerten lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, namun jumlah penduduk perempuan tidak beda jauh dengan penduduk laki-laki yaitu berjumlah 49,93% atau 6.485 jiwa.

C.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok usia berguna untuk memetakan jumlah penduduk Desa Wirokerten berdasarkan kelompok usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel berikut ini :

Tabel II.2

Susunan Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	0-15	2.986	23.00
2.	16-59	9.161	70.54
3.	60 tahun ke atas	839	6,46
Jumlah		12.986	100

Sumber : *Monografi Desa Wirokerten Tahun 2015*

Dari Tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa kelompok usia yang lebih banyak adalah kelompok usia 16 tahun sampai 59 tahun dengan jumlah 9.161 jiwa atau 70,54 %, lalu di susul dengan kelompok usia 0 tahun samapai dengan 15 tahun dengan jumlah 2.986 jiwa atau 23.00 %, sisanya 6.46 % atau 839 jiwa itu berusia 60 tahun keatas.

C.3 Penduduk Menurut Agama

Secara umu, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Wirokerten memeluk agama islam, namun ada juga yang beragama non muslim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam Tabelberikut :

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Desa Wirokerten Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	12.785	98,46
2.	Kristen Katolik	63	0,49
3.	Kristen Protestan	127	0,98
4.	Budha	6	0,04
5.	Hindu	5	0,03
6.	Konghuchu	-	
Jumlah		12.986	100,00

Sumber : *Monografi Desa Wirokerten tahun 2015*

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wirokerten mayoritas memeluk agama islam dengan jumlah 12.785 jiwa atau 98,45% dari jumlah penduduk seluruh Desa Wirokerten. Selain itu, penduduk Desa Wirokerten yang dominan memeluk agama islam terbukti dari banyaknya Masjid dan Mushola di Desa Wirokerten. Lalu jumlah penduduk menurut agama selain agama islam lebih banyak memeluk agama Kristen Protestan dengan jumlah 127 jiwa atau 0,98 %.

C.4.Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Wirokerten mempunyai mata pencaharian yag berbeda-beda, ada yang bermata pencaharian pedagang ada juga yang bermata pencaharian menjadi Buruh Tani. Untuk lebih jelas dan lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel II. 4

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Wiraswasta/Pedagang	1634	12,59
2.	Petani	526	4,12
3.	Tukang	359	2,76
4.	Buruh Tani	2563	19,73
5.	Pensiunan	147	1,13
6.	Nelayan	-	-
7.	Peternak	113	0,88
8.	Jasa	77	0,60
9.	Pengrajin	252	1,94
10.	PNS	639	4,92
11.	TNI/Polri	108	0,83
12.	Swasta	978	7,53
13.	Pekerja Seni	12	0,09
14.	Belum bekerja	1767	13,60
15.	Buruh harian lepas	3257	25,08
16.	Lain-lain	554	4,266
Jumlah		12.986	100,00

Sumber : Monografi Desa Wirokerten tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Wirokerten yang lebih banyak adalah sebagai buruh harian lepas, dengan jumlah 3257 jiwa (25,08%). lalu yang kedua disusul dengan jenis mata pencaharian sebagai buruh petani dengan jumlah 2563 jiwa (19,73%).

C.4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Desa Wirokerten bervariasi, ada yang sudah berpendidikan tinggi dan ada pula yang hanya tamat SD bahkan belum sekolah. Untuk lebih jelas jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel.II.5

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tamat Taman Kanak-kanak	1.139	8,77
2.	Tamat Sekolah Dasar/Sederajat	4.333	33,36
3.	Tamat SMP/Sederajat	1.823	14,03
4.	Tamat SMA/ Sederajat	3.063	23,58
5.	Tamat AKademi D1-D3	445	3,42
6.	Tamat S-1/Sederajat	912	7,02
7.	Tamat S-2/Sederajat	64	0,49
8.	Tamat S-3?Sederajat	7	0,05
9.	Pondok Pesantren/Pendidikan Khusus	35	0,26
10.	Sekolah luar biasa/Pendidikan Khusus	12	0,09
11.	Kursus keterampilan/Pendidikan Khusus	28	0,21
12.	Tidak Lulus	658	5,06
13.	Tidak Sekolah	467	3,59
Jumlah		12.986	100,00

Sumber : Monografi Desa Wirokerten Tahun 2015

Dari Tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Wirokerten sudah berpendidikan tingkat SD dengan jumlah 4.333 orang (33,36%), disusul dengan masyarakat yang sudah berpendidikan tingkat SMA dengan jumlah 3.063 orang (23,58%). Dari keadaan ini kita bisa tahu bahwa warga Desa Wirokerten sudah memiliki tingkat pendidikan yang baik yaitu pendidikan SMA. Bahkan di Desa Wirokerten terdapat masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi yaitu tingkat sarjana sebanyak 912 orang (7,02%), pendidikan S2 sebanyak 64 orang (0,49%) dan yang berpendidikan S3 sebanyak 7 orang (0,05%). Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, Desa Wirokerten sangat beruntung dan cepat untuk maju karena mempunyai masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi.

D. Sarana dan Prasarana

D.1. Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat, karena kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena jika seseorang sehat jasmani dan rohani akan mempermudah seseorang itu untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Desa Wirokerten adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1.	Rumah Sakit	-	-
2.	Pukesmas Pembantu	1	3.85
3.	Poskesdes	1	3.85
4.	UKBM(posyandu,polides	24	92.30
Jumlah		26	100,00

Sumber : Monografi Desa Wirokerten 2015

Dari Tabel di atas menjelaskan kepada kita bahwa sarana dan prasarana di Desa Wirokerten sudah cukup baik. Di sana memiliki poskesdesa dan puskesmas pembantu, serta memiliki posyandu di masing-masing padukuhan. Adanya sarana dan prasarana kesehatan di Desa Wirokerten ini untuk mempermudah masyarakat Di Desa Wirokerten untuk menunjang kesehatan bagi mereka. Selain itu di Desa ini juga memiliki kader kesehatan ibu-ibu yang setiap bulan diberikan sosialisai tentang kesehatan baik untuk lansia, balita dan seluruh anggota keluarga, ini berupaya agar masyarakat Desa Wirokerten bisa mendapatkan kesehatan yang baik.

D.2. Prasarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sangat bermanfaat untuk membentuk kepribadian dan moral manusia untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian sarana dan prasarana sangat diperlukan, sama halnya di Desa Wirokerten ada beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang ada sebagai berikut :

Tabel II. 7

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Gedung (unit)	Persentase (%)
1.	PAUD	6	35,29
2.	TK	5	29,41
3.	SD	5	29,41
4.	SMP	-	-
5.	SMA	1	5,89
Jumlah		17	100,00

Sumber : Monografi Desa Wirokerten Tahun 2015

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang banyak terdapat di Desa Wirokerten adalah pendidikan PAUD dengan jumlah gedung 6 unit(35,29%) lalu disusul dengan gedung TK dan SD yang sama-sama sebanyak 5 unit (29,41). Lalu gedung SMA yang berjumlah 1 unit (5,89). di Desa Wirokerten tidak ada gedung SMP seperti yang dijelaskan dalam Tabel diatas.

D.3. Prasarana Ibadah

Sarana peribadatan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan di suatu daerah, karena sarana peribadatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakatnya. Seperti halnya di Desa Wirokerten yang memiliki sarana peribadatan. Jumlah sarana peribadatan yang berada di Desa Wirokerten adalah

masjid sebanyak 23 unit, dan mushola 26 unit. Menurut informasi yang peneliti dapat kan dari salah satu perangkat desa dan buku monografi Desa Wirokerten tahun 2015, sarana peribadatan yang dimiliki Desa Wirokerten hanya sarana peribadatan umat islam ini dikarenakan di Desa Wirokerten mayoritas memeluk agama Islam. untuk lebih jelas dapat kita lihat keterangan di bawah ini :

1. Masjid :23 buah
2. Mushola :26 buah
3. Gereja : - buah
4. Pura :- buah
5. Vihara :- buah
6. Klenteng :- buah

D.4. Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana Umum adalah sarana fasilitas yang menunjuk pada fasilitas umum yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Desa Wirokerten. Hal ini sangat penting untuk membantu keperluan warga dalam melakukan kegiatan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II.8

Prasarana Umum

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1.	Olahraga	8	50,00
2.	Balai Pertemuan	4	25,00
3.	Sumur Desa	4	25,00
4.	Pasar Desa	-	-
Jumlah		16	100,00

Sumber : Monografi Desa Wirokerten Tahun 2015

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas olahraga di Desa Wirokerten cukup memadai dengan jumlah 8 unit (50,00%). Hal ini sangat membantu warga Desa Wirokerten untuk melakukan kegiatan olahraga di tingkat desa. Selain itu di Desa Wirokerten juga terdapat Balai Pertemuan dan Sumur Desa dengan masing-masing jumlah sebanyak 4 unit (25,00%). Dengan adanya Balai Pertemuan, warga Desa Wirokerten tidak perlu menyewa tempat ketika melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah desa.

E. Sosial Budaya

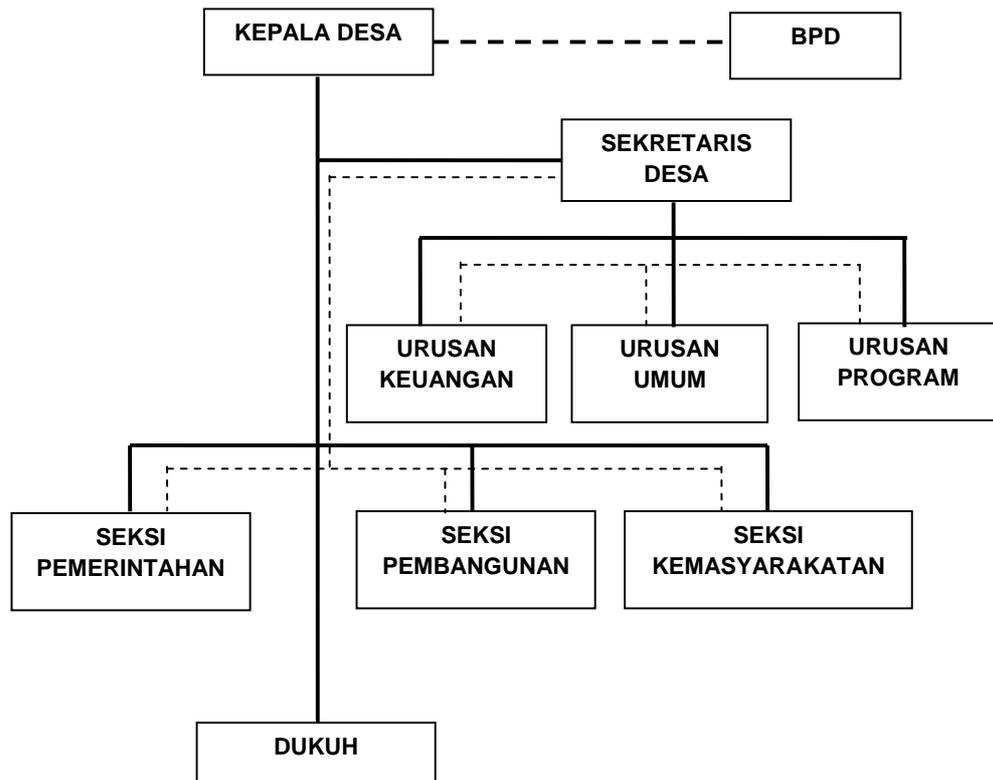
Desa Wirokerten memiliki 9 kelompok kesenian Tradisional, yaitu 4 kelompok Ketoprak dan 1 perkumpulan Wayang Orang. Selain itu terdapat juga 2 kelompok campur sari dan 2 kelompok hadroh.

Faktor rasa cinta terhadap budaya dan kesenian memuat Desa Wirokerten memiliki beberapa kelompok kesenian. Ini juga salah satu cara agar generasi selanjutnya bisa mengenal dan mengetahui kesenian tradisional, supaya kesenian tradisional ini bisa dikenal oleh anak cucu masyarakat Desa Wirokerten nantinya.

F. Lembaga Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Gambar. II. 9
Struktur Organisasi
Pemerintah Desa Wirokerten



Sumber : Kantor Kepala Desa

Kepala Desa	: Rakhmawati Wijyaningrum S.E
Sekretaris Desa	: Penanggung Jawab, Nur Alamsyah, A.md
Kepala Urusan Keuangan	: Penanggung Jawab, Kaswati
Kepala Urusan Umum	: Penanggung Jawab, Kaswati
Kepala Urusan Program	: Kosong
Kepala Seksi Pemerintahan	: Sukrisno
Kepala Seksi Pembangunan	: Widayanto, SE
Kepala Seksi Kemasyarakatan	: Nur Alamsyah, A.md

Staf :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Sukamto | 5. Marsimin |
| 2. Warsini | 6. Darmadi |
| 3. Musiyem | 7. Fitri Puji Isnani |
| 4. Indrasworo Agung Pribadi | |

Kepala Dukuh :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| Grojogan | : Rudi Budianto |
| Boto Kenceng | : Triyanto |
| Sampangan | : Jumadi |
| Wirokerten | : Isdaryanto |
| Kepoh Wetan | : Maryono |
| Kepoh Kulon | : Sunarto |
| Glondong Kerto Paten | : Widodo |
| Mutihan | : Sadjakir |

G. Badan Permusyawaratan Desa

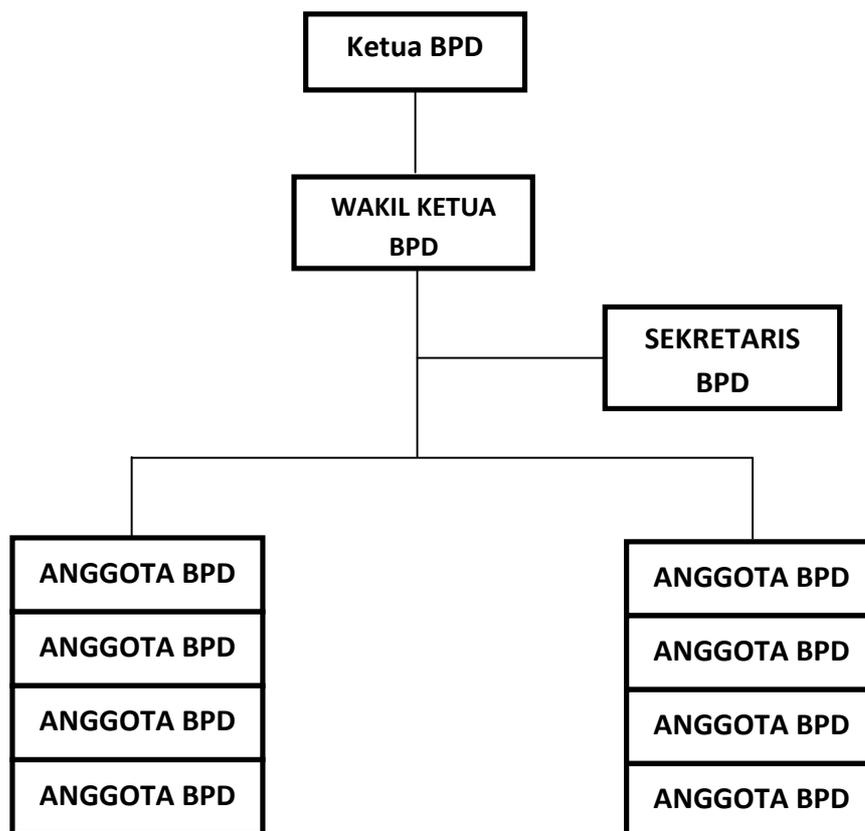
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk Desa Wirokerten. BPD dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Adapun pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wirokerten berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Wakil Sekretaris BPD dan anggota BPD.

Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang :

- 1.) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

- 2.) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- 3.) Mungusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 4.) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 5.) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6.) Menyusun tata tertib BPD

Gambar II .10. Bagan Struktur Organisasi BPD Wiroketen



Sumber :Kantor Kepala Desa

H. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan umum, pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat Desa Wirokerten, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kelembagaan Masyarakat Desa Wirokerten yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna. Adapun tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa Wirokerten Sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa;
- e. membina kerjasama antar lembaga yang ada di Desa untuk pembangunan; dan
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

H.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, LPMD mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Dalam melaksanakan tugasnya. Adapun struktur kepengurusan LPMD Desa Wirokerten sebagai yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam bagan berikut ini :

Gambar. II.11 Bagan Struktur Organisasi LPMD Wirokerten



Sumber : Kantor Kepala Desa

H.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wirokerten

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh bersama wanita sebagai penggeraknya guna mewujudkan keluarga sejahtera. Karena Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang mampu meniptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan kepuasan batin.

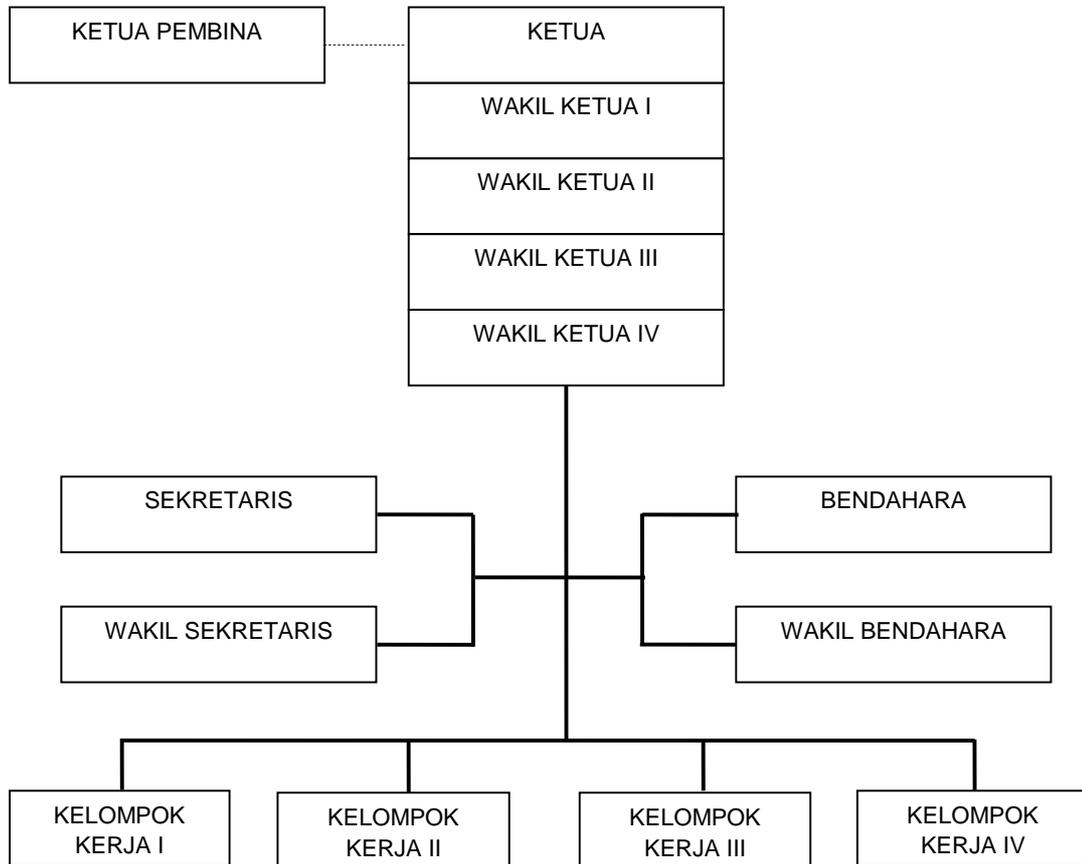
Membantu Pemerintah Desa Wirokerten dalam memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 menuju terwujudnya keluarga sejahtera.

PKK tingkat desa disebut tim penggerak PKK. Dalam membantu Pemerintah Desa, PKK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah kabupaten;
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Padukuhan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h) Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun tim penggerak PKK;
- i) melaksanakan tertib administrasi; dan
- j) mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK

Susunan organisasi PKK Desa Wirokerten terdiri dari dewan penyatu, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan kelompok kerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar II. 12 Struktur Organisasi PKK Wirokerten



Sumber : Ruang Pertemuan PKK

H.3. Karang Taruna Desa Wirokerten

Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;

- b) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
- d) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya ;
- e) Penanaman pengertian memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g) Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya ;
- h) Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- i) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- j) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;
- k) Pengembang kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ;
- l) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Susunan organisasi karang taruna terdiri dari ketua,wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

**Gambar. II.13. Bagan Struktur Organisasi Karang Taruna
Desa Wirokerten.**



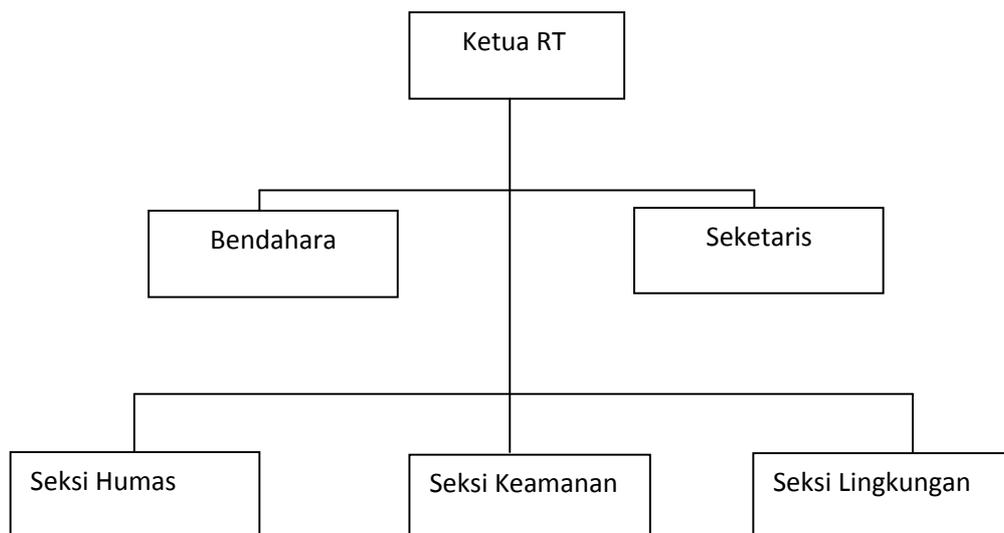
Sumber : Kantor Kepala Desa

H.4. RUKUN TENTANGGA (RT)

Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Pengurus RT mempunyai kewajiban, melaksanakan tugas dan fungsi RT :

1. Melaksanakan Keputusan anggota
2. Membina kerukunan
3. Membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
4. Ketua RT bertanggungjawab kepada masyarakat dilingkungan RT melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah
5. Sekretaris, Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada ketua

Gambar II.14 Struktur Kepengurusan Rukun Tetangga Desa Wirokerten



Sumber : Kantor Kepala Desa

BAB III

ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Dari sudut pandang negara, semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta mereka berhak mendapatkan hak untuk berpendapat, dan untuk hak dilindungi. Penyusunan perencanaan pembangunan sangatlah penting dilaksanakan, agar pada pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan lebih bermanfaat dan pembangunan dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa

Melalui Perencanaan Desa, masyarakat dilatih untuk memahami masalah dan potensi desa, agar bisa merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa tersebut. Perencanaan Pembangunan Desa harus bersifat terbuka dan partisipatif untuk semua masyarakat yang ada di Desa, dengan cara diskusi dan membahas potensi dan masalah yang ada. Diskusi dilakukan harus melibatkan semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar keadilan dalam merumuskan perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik, serta peran warga dalam pembangunan benar-benar dilibatkan.

Melibatkan perempuan dalam proses penyusunan RPJMDes dan perencanaan pembangunan akan lebih baik, agar sumber daya manusia yang ada jauh lebih baik. Keberpihakan kepada perempuan dalam proses perencanaan pembangunan akan jauh lebih baik agar mengetahui permasalahan serta dalam rangka untuk pemberdayaan perempuan-perempuan di Desa itu sendiri.

Selain itu mewujudkan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan RPJMDes harus didorong oleh banyak pihak, selain kaum laki-laki keluarga juga ikut dukungan serta memberikan kesempatan perempuan ikut terlibat dalam proses penyusunan RPJMDes, agar mereka mendapatkan dorongan semangat serta rasa dipercaya diri.

1. PEREMPUAN DILIBATKAN DALAM TIM PENYUSUN

Pemerintah Desa Wirokerten dalam proses penyusunan RPJMDes Pemerintah Desa Wirokerten telah berupaya untuk melibatkan semua elemen-elemen masyarakat termasuk kelompok perempuan yang ada di desa tersebut. Pemerintah Desa Wirokerten juga berupaya untuk lebih mengaktifkan dan mendukung kelompok perempuan, agar perempuan-perempuan di Desa Wirokerten akan lebih aktif.

Kepedulian Kepala Desa serta dukungan dari Pemerintah Desa terhadap kelompok Perempuan di Desa ini membuat ibu-ibu di Desa Wirokerten lebih aktif dan selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru demi Pembangunan dan Pemberdayaan Di Desa Wirokerten. Walaupun ibu-ibu di Desa Wirokerten banyak yang sudah berusia lanjut (lansia) tetapi mereka masih semangat karena Pemerintah Desa memberikan akses seluas-luasnya untuk mereka bisa aktif dan terlibat dalam kegiatan apapun. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rakhmawati selaku Kepala Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“memang perempuan dilibatkan di dalam tim penyusun, karena kami selalu berupaya untuk melibatkan semua unsur di dalam kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, termasuk di dalam perencanaan pembangunan. Memang perempuan dilibatkan mbak, meskipun tidak banyak tapi keterlibatan perempuannya tetap ada. (Ibu Rakhmawati Wijyaningrum S.E)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Nur Alamsyah selaku Kasi Kemasyarakatan Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“Ya mbak, mereka memang selalu dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, bukan hanya dalam kegiatan itu saja tapi dalam kegiatan lainnya juga mereka dilibatkan. Kami juga Ibu lurahnya seorang perempuan, jadi kepedulian beliau terhadap perempuan-perempuan di Desa Wirokerten cukup baik, beliau selalu melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan. Ya bisa dikatakan aktif la mbak perempuan di Desa ini.

Senada juga diungkapkan oleh Ketua LPMD Desa Wirokerten Bapak Mudono yang mengatakan bahwa :

“ Ya mbak, kelompok perempuan memang dilibatkan dalam tim penyusun, mestipun sedikit dan hanya perwakilan saja. Karena jumlah tim juga kan terbatas. Tapi keterlibatan mereka selalu ada. (Bapak Mudono)

Senada juga dengan pernyataan yang diungkapkan oleh informan diatas, Ibu Ismiyati selaku ketua PKK dan yang terlibat dalam tim penyusun membenarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh informan diatas bahwa :

“Ya, memang kami terlibat dalam Tim penyusun mbak. Memang tidak semua mbak, hanya perwakilan saja, tapi kami selalu dilibatkan dalam kegiatan apapun. Kebetulan Ibu lurah juga perempuan mbak, jadi beliau selalu melibatkan kami di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipasi yang melibatkan masyarakat. (Ibu Ismiyati)

Dari keterangan beberapa tokoh di atas memberitahukan bahwa memang di dalam tim penyusun RPJMDes Desa Wirokerten perempuan dilibatkan, mestipun jumlahnya hanya sedikit tapi Pemerintah Desa selalu berupaya melibatkan perempuan di dalam Tim Penyusun.

Hal ini dibenarkan dengan adanya daftar nama Tim Penyusun yang peneliti dapatkan dari Kasi Pembangunan Desa Wirokerten, di dalam daftar nama itu memang tertulis nama ibu-ibu yang terlibat dalam Tim Penyusun. Hal ini

menunjukkan bahwa di desa ini perempuan memang terlibat di dalam tim penyusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keterlibatan perempuan bukan hanya di lingkup ibu-ibu PKK saja, tapi Desa Wirokerten juga melibatkan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Keterlibatan perempuan di dalam berbagai kegiatan di Desa Wirokerten dikarenakan Desa Wirokerten dipimpin oleh semua perempuan, yang selalu berupaya untuk mengaktifkan dan melibatkan unsur perempuan yang ada di Desa Wirokerten. Selain itu dengan melibatkan perempuan di tim penyusun RPJMDes Desa Wirokerten keadilan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan benar-benar melaksanakannya dengan prinsip demokrasi dan partisipatif meskipun sejauh ini perempuan yang ikut terlibat jumlahnya masih sedikit, namun dengan melibatkan mereka dalam tim penyusun, diharapkan pemberdayaan perempuan di Desa Wirokerten akan lebih baik lagi, kedepan diharapkan akan banyak lagi perempuan-perempuan yang ikut terlibat di dalam Tim penyusun.

a. Jumlah Perempuan di dalam tim penyusun

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari informan, peneliti mencoba menguraikan berapa banyak perempuan yang terlibat di dalam tim penyusun, karena di dalam tim penyusun jumlah yang terlibat juga dibatasi. Selain itu dalam tim penyusun harus melibatkan unsur perempuan. Hal ini diakui oleh Bapak Mudono selaku Ketua LPMD Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“perempuan yang terlibat hanya perwakilan saja mbak, jumlahnya hanya 2(dua) orang karena di dalam tim penyusun memang dibatasi jumlah yang menjadi tim. Perempuan hanya 2 orang saja yang lain laki-laki atau bapak-bapak. Itu juga yang terlibat pamong Desa, LPMD sama perwakilan dari perempuan. (Bapak Mudono)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak M. Asrori S.Pd selaku Ketua BPD Desa Wirokerten yang mengatakn bahwa :

“jumlah perempuan yang menjadi tim berjumlah 2(dua) orang, hanya perwakilan dari kelompok perempuan saja mbak. Di dalam tim semua unsur digabungkan, dari pamong Desa sama perwakilan dari perempuan dan LPMD. (Bapak M. Asrori)

Senada dengan pernyataan di atas, dan dibenarkan oleh Ibu Ismiyati selaku ketua PKK Desa Wirokerten.

“ jumlahnya hanya 2(dua) orang mbak, yaitu saya sendiri sama anggota saya satu. I Karna ya itu mbak, memang kita bersyukur Kepala Desa kami seorang perempuan jadi kami dilibatkan. Jumlah dari unsure perempuan memang sedikit mbak, tapi mudah-mudahan jumlah perempuannya lebih banyak lagi, bahkan kalau bisa lebih banyak dari bapak-bapak atau minimal sama lah mbak jumlahnya. (Ibu Ismiyati)

Dari hasil penelitian yang saya dapatkan memang jumlah perempuan yang terlibat berjumlah 2(dua) orang, Hal ini dibuktikan dengan daftar nama tim penyusun yang peneliti dapatkan dari bapak Widayanto selaku Kasi Pembangunan. Di dalam tim penyusun nama-nama yang terlibat dalam tim penyusun berdasarkan keputusan kepal Desa sebagai berikut :

1. Bapak Irwan Purwanto S. Si
2. Bapak Nur Alamsyah, A.md
3. Bapak Widayanto S.E
4. Bapak Indarsworo
5. Bapak Mudono
6. Bapak Sukrisno
7. Ibu Ismiyati
8. Ibu Ariwidianti

Nama-nama yang tertulis diatas, adalah daftar nama tim penyusun RPJMDes Desa Wirokerten yang peneliti dapatkan dari Bapak Widayanto selaku Kasi pembangunan. Dari daftar nama yang tertulis diatas dapat kita lihat memang benar ada keterlibatan perempuan di dalam tim penyusun yang dibentuk oleh Kepala Desa. Meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam tim penyusun hanya berjumlah orang, namun Pemerintah Desa Wirokerten selalu berupaya untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Selain itu dari daftar nama tim penyusun yang peneliti dapatkan membuktikan kepada kita bahwa keterlibatan perempuan di dalam tim penyusun RPJMDes memang benar ada, ini dibuktikan dengan daftar nama diatas. Hal ini memberitahukan kita bahwa Desa Wirokerten memang melibatkan perempuan dalam tim penyusun RPJMDes. hal ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa Wirokerten benar-benar berdasarkan prinsip partisipatif, demokrasi serta keadilan karena melibatkan semua unsur. Selain itu dengan melibatkan perempuan di dalam tim akan membuat Sumber daya manusia lebih baik.

Meskipun jumlah perempuan yang terlibat hanya 2 (dua) orang, namun upaya Pemerintah Desa untuk melibatkan perempuan di dalam tim penyusun patut kita hargai. Dengan jumlah perempuan yang terlibat hanya 2(dua) orang saja, diharapkan pemberdayaan perempuan di Desa Wirokerten akan lebih baik lagi, serta akan lebih banyak lagi jumlah perempuan yang ikut terlibat di dalam tim penyusun.

b. Perempuan Yang terlibat di dalam Tim Penyusun

Keterlibatan perempuan di dalam tim penyusun, meskipun jumlah perempuan yang terlibat hanya sedikit, Tetapi keterlibatan perempuan ada. Perempuan-perempuan yang terlibat di dalam tim penyusun iya perwakilan dari ibu

PKK yang mewakili Kelompok Perempuan di Desa Wirokerten. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rakhamawati Wijyaningrum S.E selaku Kepala Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“Perempuan yang terlibat dalam tim penyusun perwakilan dari ibu-ibu PKK, ibu Ismi dengan Ibu Ari. Memang tidak semua, hanya mereka berdua saja yang terlibat yang lain Bapak-bapak, tapi mereka sudah mewakili kelompok perempuan. (Ibu Rakhmawati)

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Widayanto S.E selaku Kasi Pembangunan yang mengatakan bahwa :

“yang terlibat Perwakilan ibu Ismiyati sama Ibu Ari, mereka perwakilan dari kelompok perempuan, yang lain bapak-bapak mba. Ibu-ibu Cuma 2(dua) orang saja.(Bapak Widayanto)

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Ismiyati yang mengatakan bahwa:

“ yang terlibat dalam tim penyusun memang saya dan anggota saya ibu ari mbak, kebetulan perwakilan perempuan memang hanya 2 orang, jadi kami yang mewakili kelompok perempuan di Desa Wirokerten, yang tergabung dalam tim penyusun. (Ibu Ismiyati)

Dari Penjelasan beberapa informan diatas mengatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam tim penyusun ialah Ibu Ismiyati selaku ketua PKK Desa Wirokerten dan Ibu Ari selaku pengurus PKK Desa Wirokeretn juga. Keduanya yang ikut terlibat di dalam tim penyusun mewakili kelompok Perempuan di Desa Wirokereten. keterlibatan Perempuan memang hanya mereka saja di dalam tim penyusun dikarenakan di dalam tim penyusun yang lain bapak-bapak. Semoga dengan terlibatnya mereka di dalam tim penyusun akan menjadikan kelompok perempuan yang ada di Desa Wirokerten akan lebih aktif lagi, agar dalam perencanaan pembangunan kedepan jumlah perempuan yang terlibat akan bertambah banyak.

2. PEREMPUAN DILIBATKAN DALAM PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang kondisi serta keadaan masyarakat di Desa. Hal yang penting dilakukan dalam rangka menyiapkan dokumen RPJMDes yang mampu menyajikan data atau informasi yang logis dengan perencanaan desa adalah melakukan kajian Desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan Desa dilakukan dengan meliputi kegiatan berikut ;

a. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data dilakukan dengan meliputi pengambilan data dari dokumen data Desa lalu dibandingkan dengan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya pembangunan dan sumber daya social budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang akan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa.

b. Penggalian gagasan masyarakat

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif yang melibatkan semua unsur dari masyarakat. Pengkajian Desa dilakukan untuk mengetahui masalah dan potensi yang dihadapi Desa. Hasil pengkajian keadaan Desa dalam bentuk penggalian gagasan masyarakat akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pembinaan Masyarakat Desa.

Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Wirokerten khususnya tim penyusun RPJMDes, dalam melakukan penyusunan RPJMDes tim penyusun melakukan kegiatan pengkajian Desa yang melibatkan semua unsur masyarakat baik unsur dari kelompok tani atau unsur kelompok lainnya. semua mereka libatkan dalam melakukan kegiatan pengkajian keadaan Desa karena masyarakat yang lebih paham apa masalah dan potensi yang dimiliki Desa Wirokerten.

c. Penyusunan laporan hasil pengkajian Desa

Tim penyusun melaporkan hasil pengkajian keadaan Desa dalam bentuk berita acara.

Di dalam pengkajian keadaan Desa tim penyusun melakukan kegiatan secara berdiskusi dengan semua unsur masyarakat yang ada di Desa. Begitu juga yang dilakukan oleh Desa Wirokerten semua unsur masyarakat dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

d. Perempuan Dilibatkan Dalam Pengkajian Keadaan

Setiap Desa yang mengadakan penyusunan RPJMDes, hal yang harus dilakukan salah satunya mengkaji keadaan Desa secara bersama-sama dengan unsure masyarakat, agar dalam melakukan pemetaan keadaan dan kondisi Desa yang sekarang serta masalah dan potensi yang melibatkan masyarakat, akan mempermudah tim penyusun memetakan apa yang terjadi dengan keadaan Desa tersebut. begitu juga yang dilakukan oleh Desa Wirokerten yang selalu melibatkan semua unsure masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan termasuk kelompok perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Asrori yang mengatakan bahwa:

“ perempuan memang dilibatkan mbak, tim penyusun melakukan kegiatan pengkajian keadaan Desa bersama unsur masyarakat mbak termasuk kelompok perempuan. Karena di dalam pengkajian keadaan desa tim penyusun juga melakukan penggalian gagasan apa yang menjadi masalah masyarakat, termasuk masalah kelompok perempuan, jadi memang perempuan dilibatkan, tidak hanya menjadi terlibat di dalam tim penyusun.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Nur Alamsyah, A.md selaku Kasi

Kemasyarakata Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai tim penyusun memang melibatkan semua unsure mbak, termasuk perempuan. Di dalam pengkajian Desa kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memetakan apa yang menjadi masalah dan potensi di Desa. Keterlibatan perempuan selalu ada, karena dalam menggali gagasan masyarakat kita butuh masyarakat untuk ikut bersama-sama mendiskusikannya.(Bapak Nur Alamsyah)

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Dwi Hidayati S.Ip selaku perwakilan dari kelompokperempuan Desa Wirokerten dan pengurus PKK yang mengatakan bahwa :

“kelompok perempuan memang dilibatkan mbak, karena dalam penggalian gagasan masyarakat kami kelompok dari perempuan sama-sama berdiskusi membahas masalah yang ada. (Ibu Dwi Hidayati)

Dalam pengkajian keadaan Desa Tim penyusun melakukan kegiatan pengkajian Desa yang melibatkan semua unsur masyarakat termasuk kelompok perempuan. Keterlibatan perempuan tidak hanya di dalam tim penyusun saja tetapi keterlibatan perempua di dalam pengkajian keadaan Desa juga diupayakan oleh Tim penyusun RPJMDes Desa Wirokerten yang berupaya untuk melibatkan semua unsur masyarakat termasuk kelompok perempuan untuk bersama-sama mengkajian keadaan Desa.

Keterlibatan perempuan memang selalu diupayakan Pemerintah Desa dan tim penyusun untuk bersama-sama melakukan perencanaan pembangunan. melibatkan perempuan di dalam pengkajian keadaan juga bentuk kepedulian Pemerintah Desa dan tim penyusun terhadap keaktifan Perempuan di Desa Wirokerten. Memiliki seorang kepala Desa Perempuan, kelompok Perempuan di Desa Wirokerten semakin lebih aktif dari yang sebelumnya Karena memang Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Wirokerten memang selalu mengharuskan Perempuan ikut terlibat, termasuk dalam pengkajian keadaan Desa.

e. Jumlah Perempuan dalam pengkajian Keadaan Desa

Keaktifan Perempuan di dalam pengkajian keadaan Desa juga dilihat dari jumlah perempuan yang terlibat di dalam pengkajian keadaan desa yang kegiatannya menggali gagasan masyarakat untuk memetakan masalah dan potensi yang dimiliki Desa begitu juga yang terjadi di Desa Wirokerten, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Ningsih perwakilan dari kelompok perempuan yang mengatakan bahwa :

“ Jumlah Perempuan yang ikut terlibat di dalam pengkajian keadaan Desa lumayan banyak mbak. Perempuan-perempuan di Desa kami juga aktif, selalu ikut kalau ada kegiatan walaupun cuma perwakilan saja tapi kami terlibat karena punya kesibukan masing-masing juga mbak.(Ibu Sri)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Siti yang mengatakan bahwa :

“ keterlibatan Perempuan cukup banyak mbak. Tapi tetap bapak-bapak yang lebih banyak kalau perempuannya hanya perwakilan saja mbak, tapi perwakilan dari perempuan ada biarpun jumlahnya tidak banyak .(Ibu Siti)

Dari penjelasan informan diatas mengatakan bahwa jumlah yang terlibat dalam pengkajian keadaan Desa cukup banyak, namun jumlah tersebut tetap lebih

banyak dari bapak-bapak.jumlah mereka memang sedikit, tapi keterlibatan mereka sudah diwakili oleh ibu-ibu yang datang. Meskipun jumlah mereka sedikit, menurut informasi yang peneliti dapatkan dari informan perempuan-perempuan cukup aktif dalam kegiatan tersebut.

f. Bentuk Keterlibatan Perempuan Dalam Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua unsure untuk bersama-sama mengkaji keadaan Desa. Seperti yang dilakukan tim penyusun RPJMDes Wirokerten, dalam pengkajian keadaan Desa Tim penyusun mengajak masyarakat bersama-sama untuk ikut mengkaji keadaan desa, serta potensi-potensi yang dimiliki Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Septi Widaningsih S.pd yang mengatakan bahwa :

“Ya ikut terlibat langsung mbak, masyarakat diajak bersama-sama melakukan pengkajian keadaan Desa seperti kelompok ibu-ibu diajak untuk mendiskusikan permasalahan apa yang mereka hadapi dan ingin selesaikan. Permasalahan kesehatan, kita kelompok ibu-ibu bersama-sama mendiskusikannya dengan di damping tim pemandu. Selain kesehatan masih ada yang lainnya juga yang kami kaji.Ya bentuknya diskusi mbak, kami terlibat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Dwi Hidayati S.Ip yang mengatakan :

“ bentuk keterlibatan perempuan didalam pengkajian keadaan Desa dengan cara ikut terlibat langsung mbak dalam pengkajia. Missal perempuan diajak bersama-sama melakukan diskusi tentang masalah yang terjadi, potensi apa yang ada. Dengan dikusi keterlibatan perempuan cukup membuat suasana kegiaaan penggalian keadaan Desa cukup aktif, karena ingin mencoba dan ingin tahu membuat perempuan-perempuan aktif. Jika ada yang kurang mereka pahami, langsung bertanya.Ya dalam bentuknya diskusi mbak, terbilang aktif juga mbak, karena rasa ingin tahu jadi membuat perempuan-perempuannya ingin belajar bagaimana mengkaji keadaan Desa.

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan dalam kegiatan penggalian keadaan Desa keterlibatan perempuan di Desa Wirokerten dalam bentuk mereka

ikut secara bersama-sama di dalam diskusi kelompok yang terarah. Perempuan-perempuan ikut di dalam kelompok untuk membahas permasalahan yang ada di Desa, permasalahan yang dibahas kelompok di dalam diskusi ialah banyak hal sesuai masalah yang memang bersifat mendesak. Perempuan berdiskusi dengan di damping pemandu dalam melakukan kegiatan pengkajian keadaan Desa. Selain itu dalam pengkajian keadaan Desa perempuan juga mencoba untuk melakukan diskusi secara bersama-sama yang di damping oleh pemandu. Hal ini bukan hanya untuk mengajarkan mereka bagaimana cara melakukan pengkajian keadaan Desa tetapi juga tak kalah pentingnya adalah supaya mengajak dan mendorong perempuan-perempuan Desa untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan Desa. Dengan demikian perempuan-perempuan dapat mengambil peran penting bersama dengan lembaga lainnya yang ada di Desa.

3. PEREMPUAN DILIBATKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN MELALUI MUSYAWARAH DESA

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Desa Wirokerten mengadakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati berbagai kegiatan yang telah mereka laksanakan dalam rangka penyusunan RPJMDes. Musyawarah Desa Wirokerten melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Desa untuk bersama-sama menyepakati rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebelum melakukan musyawarah ditingkat Desa badan permusyawaratan Desa Wirokerten melakukan penjaringan melalui tingkat RT lalu ke tingkat Dukuh baru dibawa ke tingkat Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mudono selaku Ketua LPMD Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“ tahapannya penjaringan melalui tingkat RT lalu ke tingkat Dukuh, baru ke tingkat Desa. Biasanya perwakilan tingkat RT bisa sekitar 13 orang mbak. Di tingkat Dukuh memang mereka telah menyusun program-program dan masalah apa yang mereka rasakan, lalu dibawa ke tingkat Desa untuk dibahas. (Bapak Mudono)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak M. Asrori S.Pd selaku ketua BPD Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“ya mbak, kami lakukan penjaringan dulu melalui tingkat RT, nanti ditingkat RT mereka bahas bersama-sama, setelah ke tingkat RT mereka bawa ke tingkat dukuh, yang masing-masing RT ada perwakilan, di tingkat Dukuh mereka akan bahas bersama-sama untuk mereka bahas di musyawarah Desa. (M. Asrori)

Untuk mengkonfirmasi hal ini peneliti langsung menanyakan hal ini kepada kepala Dukuh Grojogan bapak Rudi Budianto yang mengatakan bahwa :

“ memang ada mbak, kita melalui tingkat Rt dulu setelah itu tingkat dukuh. Di tingkat dukuh kami bahas apa yang menjadi program kami. Setelah di bahas ditingkat Desa. Biasanya yang menyelenggarakan BPD mbak. (Bapak Rudi Budianto)

Dari pernyataan informan diatas jelas bahwa sebelum mengadakan musyawarah Desa ,Badan Permusyawaratan Desa melakukan penjaringan melalui tingkat RT setelah itu ke tingkat Dukuh. Setelah tingkat dukuh sudah dilakukan, perwakilan dari setiap dukuh akan mengikuti musyawarah tingkat Desa untuk bersama-sama membahas program atau masalah yang diusulkan oleh Masyarakat.

Penjaringan dari tingkat RT sampai ke tingkat Desa dilakukan agar mempermudah mengumpulkan apa yang menjadi masalah dan menjadi program prioritas masyarakat. Agar di dalam musyawarah Desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta menciptakan prinsip demokratis dan partisipatif.

Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD Desa Wirokerten mengundang semua unsur masyarakat termasuk perempuan, keterlibatan perempuan sangat berperan dikarenakan dalam Musyawarah Desa perempuan lebih paham tentang bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa karena dibidang ini memang tugas kelompok perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Asrori S.pd selaku BPD Desa Wirokerten yang mengatakan :

“ya mbak kami selaku BPD mengadakan musyawarah, kita mengundang semua unsur masyarakat, unsur dari perempuan juga. Karena di dalam musyawarah Desa yang kami bahas sumber dana dari mana, pelaksanaan kegiatan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat kalau di Desa kami lebih dominan Ibu-ibu, jadi perempuan-perempuan juga ikut terlibat. Bidang pemberdayaan masyarakat kelompok perempuan yang lebih paham mbak, kalau pembangunan ya bapak-bapak tapi semua sama. Ya kalau semua unsur dilibatkan itu lebih baik mbak, masyarakat juga banyak yang pintar-pinter, wawasannya luas jadi melibatkan semua memang harus, agar di dalam melaksanakan kegiatan tersebut kita sama-sama merasa nyaman (Bapak M. Asrori)

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mudono selaku Ketua LPMD Desa Wirokerten :

“ Semua unsur masyarakat ikut mbak, perempuan-perempuan juga ikut. Memang masih banyak bapak-bapak mbak, kalau perempuannya cuma perwakilan saja. (Bapak Mudono)

Hal yang sama dibenarkan oleh Ibu Ismiyati selaku ketua PKK yang mengatakan bahwa:

“ Ya mbak, memang perempuan dilibatkan karena di bidang Pemberdayaan Masyarakat memang lebih perempuan yang berperan aktif mbak. (Ibu Ismiyati)

Dari pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa di dalam Musyawarah Desa perempuan memang dilibatkan. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dari bapak-bapak tapi keterlibatan mereka memang ada, karena di Desa Wirokerten bidang Pemberdayaan Masyarakat memang lebih berperan aktif kelompok perempuan. Mereka yang lebih berperan dalam memberdayakan masyarakat-masyarakat di Desa Wirokerten. Di dalam Musyawarah Desa perempuan bersama-sama dengan unsur masyarakat lainnya untuk membahas berbagai hal seperti kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, sumber dana rencana kegiatan tersebut.

Keterlibatan perempuan di dalam musyawarah Desa yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa memang diharuskan karena dengan melibatkan semua unsur termasuk perempuan prinsip-prinsip penyelenggaraan perencanaan pembangunan agar bersifat partisipatif dan demokratis. Selain itu dengan melibatkan perempuan pelaksanaan kegiatan akan bersifat adil karena semua unsure dilibatkan, bukan hanya itu saja melibatkan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan akan membantu memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Desa.

Sebelum mengikuti musyawarah tingkat Desa, biasanya perempuan-perempuan diberikan arahan serta melakukan penjangkangan melalui tingkat bawah yaitu RT sampai ke tingkat Dukuh yang dilakukan oleh Tim Penyusun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ummy Khalifah yang mengatakan bahwa :

“ Ya mbak, kami melakukan pertemuan dari tingkat RT, lalu ke tingkat Dukuh perwakilan tingkat Dukuh akan membahas di tingkat Desa. Pertemuan ini khusus untuk kelompok perempuan mbak , nanti baru dipilih program apa yang benar-benar mendesak dan diprioritaskan. (Ibu Ummy)

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Septi Widianingsih S.Pd yang mengatakan:

“ya mbak, kami melakukan penjangkaran melalui tingkat Rt ketingkat dukuh lalu tingkat Desa. Contohnya dari dukuh mengusulkan adanya posyandu tingkat dukuh.(Ibu Septi)

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut peneliti langsung menanyakan kepada Ibu ismiyati selaku perwakilan perempuan yang terlibat di dalam tim penyusun Desa yang mengatakan :

“Ya mbak, memang ada mbak.Memang melalui RT dan diteruskan melalui tingkat Dukuh atau kelompok.lalu ketingkat Desa. hal ini kami lakukan agar mempermudah masyarakat untuk mengkaji apa yang menjadi masalah mereka. (Ibu Ismiyati)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa sebelum melakukan kegiatan-kegiatan penyusunan RPJMDes,dan setelah terbentuk tim penyusun mereka mengadakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui tingkat dukuh atau kelompok serta ketingkat RT yang dilakukan oleh tim penyusun . hal ini dilakukan agar membantu masyarakat dalam memetakan masalah-masalah yang mereka hadapi agar dalam kegiatan penyusunan RPJMDes akan mempermudah masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyusunan rencana pembangunan agar dalam pelaksanaan perempuan bisa ikutserta dalam kegiatan penyusunan RPJMDes.

4. PEREMPUAN DILIBATKAN DALAM MUSRENBANG

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Desa perencanaan pembangunan yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJMDes. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan semua unsur masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Desa Wirokerten, Kepala Desa Wirokerten menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan yang membahas dan menyetujui rancangan RPJMDes. Kegiatan ini melibatkan semua unsur yang ada di Desa Wirokerten. Pembahasan ini berisi tentang Keterlibatan perempuan di dalam kegiatan musrenbang Desa Wirokerten. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rakhmawati Wijyaningrum S.E selaku kepala Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“ Ya ikut terlibat mbak, kami selaku Pemerintah Desa berupaya untuk membuat perempuan-perempuan ikut terlibat, termasuk dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Bukan hanya dalam kegiatan ini saja, tapi dalam kegiatan-kegiatan lain juga kita libatkan. (Ibu Rakhmawati)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Mudono selaku Ketua LPMD Desa Wirokerten yang mengatakan :

“Ya mbak memang perempuan juga ikut terlibat, karena di dalam musrenbang semua unsur ikut terlibat.(Bapak Mudono)

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Rudi Budianto selaku Dukuh Grojogan yang mengatakan :

“Perempuan memang ikut terlibat mbak, biasanya yang mewakili kelompok perempuan tingkat Desa. Karena musrenbang kegiatannya membahas dan

menyepakati jadi semua unsur dilibatkan, ya termasuk perempuan mbak.(
Bapak Rudi Budianto)

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan kepada kita bahwa memang perempuan di Desa Wirokeretn dilibatkan. Keterlibatan perempuan di dalam musrenbang adalah salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Desa terhadap partisipasi perempuan yang ada di Desa, agar bisa mendorong dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap perempuan-perempuan yang ada di Desa. Karena tidak mudah mendorong perempuan yang ada di Desa untuk ikut berperan aktif. Dengan melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan, serta mendukung program-program yang mereka usulkan secara tidak langsung akan membuat partisipasi perempuan lebih baik.

a. Jumlah Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang

Pada saat musrenbang yang dilakukan Desa Wirokerten, keterlibatan perempuan memang selalu diupayakan. Keterlibatan perempuan tidak semata-mata hanya sampai di dalam tim penyusun saja tetapi keterlibatan perempuan di kegiatan-kegiatan penyusunan RPJMDes juga terlibat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ismiyati selaku Ketua PKK Desa Wirokerten yang mengatakan :

“Jumlah perempuan yang ikut terlibat cukup banyak mbak, tapi tetap lebih banyak bapak-bapak karena unsur-unsur masyarakat lainnya kebanyakan bapak-bapak sebagai pengurus.(Ibu Ismiyati)

Senada apa yang diungkapkan oleh Ibu Septi Widianingsih S.Pd yang mengatakan bahwa :

“Memang yang terlibat banyak mbak, karena semenjak ibu lurah kami seorang perempuan keaktifan dan partisipasi perempuan di Desa kami

semakin aktif mbak, beliau juga peduli dengan perempuan-perempuan, selalu mendukung program kami.(Ibu Septi Widianingsih)

Senada yang diucapkan oleh Ibu Kaswati selaku Perangkat Desa Perempuan di Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“Ya memang mereka banyak yang hadir mbak pada saat musrenbang. Biasanya memang perempuan-perempuan selalu datang kalau ada kegiatan. Kalau jumlahnya tetap lebih banyak laki-laki mbak, tapi perempuan juga ada.(Ibu Kaswati)

Dari pernyataan informan diatas mengatakan bahwa jumlah perempuan yang ikut dalam musrenbang cukup banyak. Ini dibuktikan dengan daftar nama perempuan-perempuan yang peneliti dapatkan dari ketua PKK desa Wirokeretn. Nama-nama tersebut adalah :

Sudati	Ita Wijayat
Nurhayati	Dwi Astuti
Wartini	Murajati
Triningsih	Umy Fatimah
Sudaryanti	Enni
Ummy Khatifah	Sumarsita
Wulan	Karsiti
Uswatun	Hutami
Dwi Hidayati	Tri Sejati
Samiyatun	Siti Hotijah
Septi Widianingsih	

Nama-nama diatas adalah perwakilan dari perempuan yang ikut terlibat dalam musrenbang. Jumlah mereka memang tidak melebihi jumlah bapak-bapak. Meskipun jumlah mereka hanya sedikit, namun dengan hadirnya mereka di dalam musrenbang pelaksanaan musrenbang benar-benar bisa dikatakan bersifat partisipatif dan menunjang kesetaraan perempuan. Karena dalam pelaksanaan pemerintah desa berupaya melibatkan semua unsur termasuk perempuan. Dengan hadirnya perempuan di dalam musrenbang Desa Wirokerten, Pemerintah Desa dengan unsur masyarakat lainnya bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, karena keterlibatan semua unsur masyarakat memang sudah diwakilkan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari informan jumlah yang terlibat masih sedikit dikarenakan waktu, dan kesibukan.

b. Keaktifan Perempuan Dalam Musrenbang

Dalam pelaksanaan musrenbang harus bersifat partisipatif dan demokratis melibatkan semua unsur masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan. Melibatkan semua unsur masyarakat baik laki-laki maupun perempuan diharapkan agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bisa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipatif. Begitu pun yang dilakukan Desa Wirokerten, keterlibatan semua unsur masyarakat memang harus dilibatkan, baik unsur laki-laki maupun perempuan, selain terlibat mereka juga diharapkan mampu memberikan suara di dalam perencanaan tersebut. Melibatkan semua unsur adalah suatu tindakan yang adil agar tidak ada kecemburuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Kepala Desa Wirokerten juga berupaya untuk melibatkan Perempuan-perempuan yang ada di Desa Wirokerten seperti yang diungkapkan oleh Ibu Septi Widianingsih S.Pd yang mengatakan :

“Ya mbak kami aktif di dalam musrenbang, bahkan aktif sekali karena kami memiliki banyak program-program yang harus kami perjuangkan, tidak semata-mata hanya hadir tapi kami juga kerap bersuara.(Ibu Septi)

Hal yang sama dibenarkan oleh Ibu Ismiyanti selaku Ketua PKK Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“ Ya mbak, kami dari unsur perempuan memang berupaya untuk semaksimal mungkin aktif dalam musrenbang. Karena perempuan-perempuan juga punya program yang mereka perjuangkan. Jadi tidak hanya datang saja tapi mereka juga memperjuangkan apa yang menjadi keinginan mereka. (Ibu Ismiyati)

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alamsyah, A.md selaku kasi Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa :

“ ya mbak, mereka memang aktif, bahkan aktif sekali. Ya itu mbak, karena kami juga lurahnya seorang perempuan, jadi memang beliau peduli dengan perempuan-perempuan yang ada di Desa kami.(Bapak Nur Alamsyah)

Dari pernyataan beberapa tokoh di atas mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan musrenbang perempuan yang ikut terlibat tidak semata-mata hanya hadir untuk memberikan partisipasi, tapi mereka juga ikut aktif dalam musrenbang tersebut.seperti halnya mereka memperjuangkan program-program yang mereka usulkan. Mereka bersama-sama memperjuangkan apa yang mereka inginkan di dalam kegiatan musrenbang terus.

Hal ini salah satu mendorong partisipasi perempuan di Desa, karena dengan mendorong mereka untuk aktif dan memberika ruang seluas-luasnya untuk mereka bersuara akan mendorong mereka untuk lebih aktif lagi.

c. Keaktifan laki-laki dan perempuan di dalam musrenbang

Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Asrori selaku Ketua BPD yang mengatakan bahwa :

“ kalau di dalam musrenbang yang berperan aktif bapak-bapak mbak, jumlah laki-laki juga lebih banyak dari perempuan. Tapi perempuan juga berperan aktif seperti mereka memperjuangkan di bidang pemberdayaan masyarakat, kalau bapak-bapak di bidang pembangunan. Tapi kami mengurangi kegiatan pembangunan fisik mbak, kami lebih ke pemberdayaan masyarakat, yang bisa tugas perempuan di bidang tersebut. (Bapa M. Asrori)

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Dwi Hidayati S.Ip selaku Perwakilan dari kelompok perempuan yang mengatakan bahwa:

“ya mbak, kalau aktif tetap lebih dominan bapak-bapak mbak, tapi perempuan juga aktif, aktif sekali hanya saja jumlah laki-laki yang lebih banyak dari perempuan tetapi semua sama-sama aktif. di Desa ini dalam hal pemberdayaan biasanya itu lebih dominan ibu-ibu, tapi kalau pembangunan fisik bapak. tapi sekarang lebih ke pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan mbak, kalau pembangunan fisik sekarang dikurangi. (Ibu Dwi)

Dari pernyataan informan di atas mengatakn bahwa di dalam musrenbang memang yang berperan aktif lebih dominan laki-laki, karena peserta musrenbang memang lebih banyak dari kaum laki-laki. Tetapi perempuan juga aktif, hanya saja karena bapak-bapak lebih banyak. Keterlibatan perempuan di dalam musrenbang bukan sekedar hanya datang tapi mereka juga aktif, keduanya sama-sama aktif hanya saja banyak yang lebih dominan tetap bapak-bapak. kelompok perempuan selalu berupaya untuk aktif di dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena mereka juga mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan apa yang menjadi program mereka agar pemberdayaan masyarakat di Desa Wirokerten juga.

Penyataan di atas memberitahukan kita keterliatan perempaun dan keaktifan mereka di dalam musrenbang semata-mata tetap lebih dominan laki-laki, karena dalam musrenbang yang hadir lebih banyak dari laki-laki. Namun hal ini awal yang baik agar mendorong perempuan-perempuan di Desa Wirokerten lebih aktif lagi dalam keikutsertaan mereka dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

d. Program Yang diusulkan perempuan di dalam perencanaan pembangunan
Melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan tidak hanya dilihat dari partisipasi mereka dalam kegiatan musrenbang saja. Tetapi juga harus memberikan mereka ruang untuk menyampaikan apa yang mereka program kan. Sama hal yang dilakukan oleh Perempuan-perempuan yang ada di Desa Wirokerten mereka juga mempunyai program-program yang mereka usulkan pada saat perencanaan pembangunan. Seperti yang diungkapkan Ibu Sri Indriningsih yang mengaakn bahwa

“ program-program yang kami usulkan pada saat musrenbang yaitu Meningkatkan ekonomi perempuan, kesehatan produksi perempuan, kesehatan balita,program pelatihan untuk perempuan-perempuan, memberdayakan perempuan di Desa, membentuk forum untuk meningkatkan partisipasi perempuan. (Ibu Sri Indriningsih)

Sama hal yang diungkapkan oleh Ibu Septi Widianingsih S.Pd yang mengatakan bahwa :

“program yang kami usulkan banyak mbak, ada pelatihan untuk perempuan-perempuan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga, membentuk forum untuk memberdayakan perempuan. (Ibu Septi Widianingsih)

Dari pernyataan diatas informan menjelaskan program-program yang mereka usulkan di dalam perencanaan pembangunan Desa.Program itu atas dasar keinginan dan masalah yang dihadapi kelompok perempuan di Desa Wirokerten. Terlepas apakah usulan mereka akan di dukung oleh Pemerintah Desa untuk melaksankannya atau tidak, namun setidaknya perwakilan ibu-ibu di Desa Wirokerten sudah berusaha berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa. Hal-hal yang mereka usulkan juga terkait tentang pemberdayaan, bukan pembangunan fisik.Program-program yang mereka usulkan merupakan upaya untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada

di Desa, bukan hanya fisik saja tetapi mereka berusaha untuk memperjuangkan program-program yang lebih pemberdayaan masyarakat. Agar memberikan ruang kepada perempuan yang ada di Desa Wirokerten untuk aktif dalam pembangunan Desa Wirokerten. Dengan program yang diusulkan oleh kelompok perempuan dan diperjuangkan oleh mereka secara bersama-sama akan mencerminkan apa yang benar-benar mereka butuhkan di Desa.

e. Hasil Keterlibatan Perempuan dalam penyusunan RPJMDes

Hasil dari kelompok perempuan dalam keikutsertaan mereka di kegiatan penyusunan RPJMDes seperti hal yang diungkapkan Ibu Septi Widianingsih S.Pd yang mengatakan :

“ Hasil dari keterlibatan perempuan ya bisa terlaksanakan program-program yang telah kami usulkan mbak, semua program yang kami usulkan terealisasi. Selain semua program yang kami usulkan terealisasi, kami juga bisa mendorong masyarakat untuk aktif dengan membentuk forum pemberdayaan perempuan. Salah satu keberhasilan kami yaitu bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada Ibu-ibu di sini, mendapat bantuan dana juga dari Pemerintah Desa. (Ibu Septi)

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Ismiyati selaku Ketua PKK yang mengatakan bahwa :

“kalau hasilnya ada mbak, dengan terlibatnya perempuan dalam penyusunan yang pasti mendorong perempuan lebih aktif lagi. Kalau hasil lainnya seperti di Desa kami mempunyai kelompok kesejahteraan perempuan. Dari hasil perempuan terlibat dalam penyusunan RPJMDes, bisa mengakomodir kebutuhan perempuan. Selain itu kelompok perempuan juga lebih paham bagaimana mengkajian permasalahan dan potensi yang ada. Yang pasti program-program kami terlaksanakan mbak, dengan dibantu oleh Pemerintah Desa. (Ibu Ismiyati)

Dari pernyataan informan di atas memberitahukan kepada kita hasil dari keterlibatan perempuan di dalam penyusunan RPJMDes. Selain mendorong masyarakat untuk aktif dan melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan, hasil yang

mereka dapatkan ialah dapat melaksanakan program-program yang mereka usulkan dengan di danai oleh Pemerintah Desa. Keterlibatan Perempuan di dalam penyusunan RPJMDes terlihat nyata dengan keberhasilan mereka memperjuangkan program-program yang mereka usulkan, menjadi terwujud supaya pemberdayaan perempuan di Desa Wirokerten semakin aktif lagi.

Selain dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kelompok perempuan di Desa Wirokerten, keberhasilan mengikutsertakan perempuan dalam penyusunan RPJMDes juga mampu mewujudkan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan demokratis. Keberhasilan perempuan ikutserta terlibat dalam perencanaan pembangunan awal yang baik untuk mendorong perempuan-perempuan di Desa Wirokerten supaya lebih kreatif dan mampu mengeluarkan ide-ide baru untuk pembangunan yang ada di Desa Wirokerten, Bukan hanya pembangunan fisik tetapi lebih pemberdayaan masyarakat Desa supaya kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.

- f. Strategi pemdes dalam menumbuhkan kesadaran perempuan untuk menyampaikan aspirasi.

Kesadaran dari perempuan bahwa menyampaikan aspirasi itu sangat penting, hal ini dinilai masih rendah, Dalam hal ini masyarakat masih merasakan kurang percaya diri untuk menyampaikan keinginan dan permasalahan yang mereka rasakan. Mereka masih belum memiliki keberanian yang kuat untuk menyampaikan keinginannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rakhmawati Widianingrum S.E selaku Lurah Desa Wirokerten yang mengatakan :

“kesadaran perempuan dalam menanggapi betapa pentingnya aspirasi mereka memang belum maksimal mbak, ya maklum namanya juga di desa mbak. Namun pemerintah desa selalu berupaya semaksimal mungkin menumbuhkan kesadaran perempuan dengan cara memancing agar mereka ingin berbicara serta mendamping mereka kalau ada pertemuan, jadi kami berusaha untuk mendamping mereka. Ya strategi pemerintah desa dengan cara menghadiri pertemuan yang mereka lakukan baik bersifat formal atau tidak formal tetap kami usahakan untuk selalu datang. Selin itu kami mendukung program-program dari kelompok perempuan, memberi perhatian kepada kelompok perempuan dengan cara mendukung mereka. (Ibu Rakhmawati Widianingrum S.E)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu lurah diatas, Pemerintah Desa Wirokerten selalu berupaya melakukan hal-hal yang bisa membuat perempuan di desa ini lebih aktif, salah satu dengan cara pendekatan kepada mereka melalui pertemuan, selain itu dengan cara memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan perempuan, dengan strategi ini diharapkan bisa membuat ibu-ibu merasa semangat dan akan lebih banyak yang ikut aktif. Pemerintah selalu berupaya semaksimal mungkin terhadap masalah perencanaan pembangunan, selalu ada upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk membuat perempuan-perempuan di desa ini bisa paham dan sadar bahwa setiap perencanaan pembangunan, aspirasi mereka sangat lah dibutuhkan.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Suprpty selaku masyarakat umum yang mengatakan bahwa:

“ iya mbak memang benar, pemerintah desa berupaya membuat perempuan di desa ini lebih aktif, selalu mendukung perempuan.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Suprpty, mengatakan memang pemerintah desa memiliki cara-cara untuk selalu membuat ibu-ibu di Desa Wirokerten aktif, Pemerintah Desa khususnya kepala Desa Wirokerten selalu mendukung kegiatan-kegiatan perempuan. Hal senada juga disampaikan oleh

Bapak Nur Alamsyah selaku kasi Kemasyarakatan Desa Wirokerten yang mengatakan bahwa:

“ Cara yang kami lakukan dengan mendukung kegiatan-kegiatan perempuan mbak, apalagi lurah kami seorang perempuan jadi beliau lebih peduli dengan perempuan-perempuan di Desa kami (Bapak Nur Alamsyah)

Pernyataan dari kasi kemasyarakatan di atas menunjukkan adanya usaha pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran perempuan di desa wirokerten, bahwa pendapat mereka juga sangat diharapkan.

Jadi dari berbagai pendapat informan di atas telah menggambarkan bahwa banyak hal yang diupayakan Pemerintah Desa untuk menumbuhkan kesadaran perempuan bahwa menyampaikan aspirasi itu.

Senada yang disampaikan oleh Ibu Siti Rojayati selaku pengurus PKK desa Wirokerten yang mengatakan bahwa :

“Biasanya dengan melakukan pertemuan mbak itu yang dilakukan Pemerintah Desa, biasanya juga kalau ibu-ibu mengadakan acara baik formal atau tidak formal Ibu lurah berusaha hadir, kalau beliau sibuk biasanya perangak desa.

Pemerintah Desa melakukan strategi khusus dalam hal penjangkauan aspirasi perempuan, dengan cara mendukung dan melakukan penyaringan aspirasi perempuan agar Pemerintah Desa bisa tahu apa yang diinginkan masyarakat, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kelompok perempuan menyampaikan keinginan mereka untuk Desa yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Dari keterangan yang disampaikan beberapa informan diatas, dapat dikatakan strategi yang dilakukan Pemerintah Desa sangat baik, strategi ini mampu membuat ibu-ibu di Desa Wirokerten lebih aktif. Selain itu strategi ini diharapkan mampu

menumbuhkan kesadaran perempuan di Desa Wirokerten bahwa keaktifan mereka sangatlah diharapkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Wirokerten kedepan lebih baik. Dengan adanya penjangkaran aspirasi perempuan ini diharapkan mempermudah Pemerintah Desa untuk melibatkan Perempuan-perempuan dalam segala hal, khususnya dalam proses penyusunan RPJMDes.

5. Kendala Perempuan Dalam Penyusunan RPJMDes

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erni yang mengatakan bahwa :

“Kalau kendala hanya diwaktu saja mbak, kadang kalau ada pertemuan musyawarah dilakukan pada malam hari, karena kalau siang banyak bekerja. Kadang ibu-ibu juga terkendala antara jagain anak dirumah atau ikut rapat.(Ibu Erni)

Senada dengan apa yang diungkapkan Ibu Sri Indriningsih yang mengatakan bahwa :

“Kalau kendala sih tidak ada mbak, cuma masalah waktu aja karena banyak pertemuan-pertemuan dilakukan pada malam hari, karena biasanya banyak yang kerja. Waktu mala mini yang menjadi kendala perempuan, kadang kalau malam yang datang sedikit.

Dari pernyataan informan diatas mengatakan bahwa kendala yang dihadapi perempuan dalam penyusunan RPJMDes ialah dikarenakan waktu. Terkadang mereka terkendala dengan waktu, karena mereka harus memilih antara jagain anak atau ikut rapat. Sementara menurut mereka keduanya sangatlah penting. Padahal mereka juga ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan ataupun kegiatan lainnya. Semoga kedepan kendala ini bisa menjadi pengalaman dan bisa di musyawarahkan secara bersama-sama.

- a. Harapan Perempuan dalam penyusunan RPJMDes yang akan datang

Harapan ialah suatu keinginan yang diharapkan dimasa yang akan datang, begitu juga dengan perempuan-perempuan di Desa Wirokerten. Mereka berharap perempuan-perempuan bisa lebih aktif lagi, seperti diungkapkan Ibu Ismiyati yang mengatakan bahwa :

“harapannya semoga kedepan perempuan-perempuan di Desa Wirokerten lebih aktif lagi, semoga keterlibatan perempuan bisa memberikan perubahan yang lebih baik kepada Desa, selain itu semoga lebih dikenal di luar bukan hanya di Desa Wirokerten saja. Keikutsertaan perempuan di dalam perencanaan pembangunan ataupun kegiatan lainnya, bisa memberikan pengetahuan lebih luas kepada perempuan-perempuan, kalau bisa kedepan di dalam tim penyusun perempuannya lebih banyak lagi, dalam kegiatan lainnya juga lebih banyak yang terlibat. (Ibu Ismiyati)

Hal yang sama diungkapkan Ibu Septi Widianingsih yang mengatakan :

“Semoga kedepan lebih banyak lagi yang aktif, selain itu semoga program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan juga didukung terus oleh Pemerintah Desa.semoga perempuan-perempuan di Desa Wirokerten lebih kompak lagi. Dan selalu dilibatkan kalau ada kegiatan.(Ibu Septi)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ummy Khalifah yang mengatakn :

“Semoga perempuan di Desa kami dapat lebih aktif mbak, kalau ada kegiatan bisa mengikutsertakan perempuan juga, mestipun cuma perwakilan.Selain itu laki-laki juga bisa dan terus mendukung perempuan-perempuan.

Dari pernyataan informan diatas berharap agar keterlibatan perempuan lebih aktif lagi, lebih banyak yang ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan, bahwakan kegiatan lainnya. selain itu perempuan-perempuan di Desa Wirokerten juga berharap kaum laki-laki juga bisa mendukung keterlibatan mereka dalam proses-proses perencanaan pembangunan dan kegiatan lainnya. Selain itu dukungan dan bimbingan dari Pemerintah Desa juga selalu mereka harapkan agar partisipasi perempuan di Desa Wirokerten semakin aktif lagi, dan bisa semakin banyak yang ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan berdasarkan ruang lingkup penelitian, maka peneliti memperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Keterlibatan Perempuan Dalam Tim Penyusun

Di dalam tim penyusun RPJMDes Desa Wirokerten memang perempuan dilibatkan dalam tim, hanya saja jumlah perempuan di dalam tim penyusun berjumlah 2(dua) orang,

2. Keterlibatan Perempuan dalam Pengkajian Keadaan Desa

Di dalam pengkajian Keadaan Desa Kelompok Perempuan di Desa Wirokerten memang dilibatkan secara bersama-sama untuk mendiskusikan apa yang menjadi masalah dan potensi.

3. Keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Desa

Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, kelompok Perempuan di Desa Wirokerten memang dilibatkan, mereka bukan hanya ikut berpartisipasi tapi mereka juga aktif dalam memberikan masukan serta mengusulkan program-program dari Kelompok Perempuan.

4. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang

Kegiatan Musrenbang di Desa Wirokerten juga ikut melibatkan Perempuan, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pada saat musrenbang. Selain itu, kelompok perempuan berupaya aktif di dalam Musrenbang. Meskipun jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan.

5. Kendala perempuan dalam penyusunan RPJMDes

Pada saat kegiatan penyusunan RPJMDes perempuan-perempuan Desa Wirokerten mendapatkan kendala, yaitu pertemuan dalam membahas perencanaan pembangunan sering diadakan di malam hari, ini membuat perempuan harus memilih ikut rapat atau nungguin anak dirumah.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan: 1.) Semoga Pemerintah Desa ke depan bisa lebih memberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. 2.) Kendala yang di hadapi perempuan dalam proses kegiatan penyusunan RPJMDes, bisa menjadi referensi Pemerintah Desa serta kelompok perempuan untuk ke pelajaran atau pengalaman di masa yang akan datang.

DaftarPustaka

- Eko,Sutoro, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta
- Mansour, Fakih, 1996, *Gender dan Pemberdayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.A, Bintoro Tjokroamidjojo, 1995.*Perencanaan Pembangunan*, PT Toko Agung, Jakarta.
- Moleong, J Lexy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mosse, Julian Cleves. 2007, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad, Yasin Dkk, 2015, *Anotasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014*, Pattiro, Jakarta.
- Safi'i, H.M., 2008. Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Averroes Press, Mojolangu-Malang.
- Saptani Ratna dan holzoner brigte.1997. *perempuan, kerja, dan perubahan sosia*, Pustaka Utama graffiti, Jakarta.
- Siola,Fransiskus,Xaferius,(TanpaTahun),*Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sunyoto, Usman, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widoyo, EkoPutro, 2012. *Teknik penyusunan instrument penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zulkarimen Nasution, 2007.*Komunikasi Pembangunan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sumber Lain :

Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Pemendagri No 114 Tahun 2014

Sumber :<http://www.keuandangdesa.com> 2013/04/18-penyusunan-RPJMD-Desa.PDF

Sumber : <http://nanasurwargana.blogspot.co.id> 2012/02/ benarkah-populasi-perempuan-lebih banyak-dari lai-laki.

Daftar Pertanyaan
Untuk Pemerintah Desa dan BPD

1. Apakah Perempuan Dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes ?
2. Siapa Saja Yang Terlibat ?
3. Berapa Jumlah Perempuan Yang Terlibat ?
4. Apakah Unsur Dari Perempuan Aktif ?
5. Apakah Laki-laki lebih Aktif dari pada Perempuan ?
6. Strategi Pemerintah Desa untuk mengaktifkan Perempuan di Desa Wirokerten ?

Daftar Pertanyaan
Untuk Perwakilan Dari Perempuan

1. Apakah Perempuan dilibatkan Dalam Tahapan Penyusunan RPJMDes ?
2. Siapa Perwakilan Perempuan yang terlibat ?
3. Apakah Perempuan Aktif ?
4. Apakah Laki-laki lebih Aktif dari pada Perempuan ?
5. Apa Saja Program-Program dari Kelompok Perempuan ?
6. Hasil yang di dapatkan perempuan dalam mengikuti penyusunan RPJMDes ?
7. Kendala yang dihadapi perempuan ?
8. Kepedulian Pemerintah Desa terhadap Perempuan di Desa Wirokerten ?

A. Deskripsi informan

Deskripsi informan perlu diketahui karena berisi tentang data-data mengenai informan yang menjadi sampel pada saat meneliti, sehingga melalui ini dapat membantu peneliti untuk menjelaskan beberapa hal yang mendasari informan dalam memberikan jawaban, data dan informasi atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Informan merupakan unsure yang paling penting dalam penelitian, karena informan berperan sebagai subjek dari setiap penelitian dan bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan dalam suatu tempat atau wilayah (Objek), dalam hal ini peneliti menentukan informan.

A.1. Deskripsi Informan Berdasarkan Nama dan Jabatan

Deskripsi informan berdasarkan nama dan jabatan perlu dijelaskan agar mengetahui informan yang diwawancarai dan jabatannya dalam Pemerintah Desa dan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa.

Tabel III. 1

Deskripsi Informan Berdasarkan Nama dan Jabatan

No	Nama	Jabatan
1.	Rakhmawati Wijayaningrum S.E	Kepala Desa
2.	Widayanto	Kasih Pembangunan
3.	Nur Alamsyah	Kasih Kemasyarakatan
4.	Fitri Puji Isnani	Staff Keuangan
5.	Kaswati	Kaur Umum
6.	M. Asroni	Ketua BPD
7.	Mudono	Ketua LPMD
8.	Syajakir	Dukuh Mutilan
9.	Rudianto	Dukuh Grojogan
10.	Ismiyati Sunartana	Ketua PKK
11.	Septi Widya Ningsih S.Pd.	Anggota PKK
12.	Siti Rohjiyanti	Anggota PKK
13.	Sri Indriningsih	Anggota PKK
14.	Dwi Nurhidayati	Anggota PKK
15.	Suprpty	Masyarakat
16.	Ummi Khafidah	Masyarakat
17.	Erni	Masyarakat

A.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur

Deskripsi informan berdasarkan umu perlu dijelaskan untuk mengetahui tingkat pengalaman dan pola pikir infoman saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Tabel III. 2

Deskripsi Informan Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	20-30	1	5,88
2.	31-40	7	41,17
3.	41-50	2	11,78
4.	51-60	4	23,52
5.	61-70	3	17,64
Jumlah		17	100,00

Dari table di atas menunjukkan bahwa umur informan lebih banyak pada usia diantara 31-40 tahun dan di atas umur 51 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa informan yang dipilih merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan cukup luas, sehingga dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan, khususnya yang berkaitan dengan Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan RPJMDes. Dengan informan pada umur tersebut mereka lebih banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang keterlibatan perempuan di Desa Wirokerten tersebut.

A.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel I. 3

Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1.	Laki-Laki	6	35,30
2.	Perempuan	11	64,70
Jumlah		17	100,00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwa jumlah informan yang diwawancarai pada saat penelitian lebih banyak pada perempuan atau lebih dominan perempuan, ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan RPJMDes, jadi informan yang lebih banyak di wawancara ialah perempuan-perempuan.

A.4 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Jabatan/Perkerjaan

Deskripsi informan berdasarkan pekerjaan atau jabatan untuk mengetahui aktivitas serta kegiatan sehari-hari informan. Selain untuk sebagai data perbandingan antara yang bekerja tetap serta pekerjaan sampingan juga untuk mengetahui bagaimana keterlibatan

perempuan di di dalam proses penyusunan RPJMDes dengan melihat kegiatan sehari-hari mereka.

Posisi serta kedudukan yang dimiliki seseorang dalam instansi atau keseharian di masyarakat untuk mengetahui peran serta fungsi serta wewenang yang dimilikinya. Informan juga pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi topik yang akan dibahas peneliti,. Perbedaan pendapat tersebut di karenakan posisi mereka di instansi serta keseharian mereka di masyarakat. Di bawah ini peneliti menjelaskan posisi dan jabatan mereka yang disajikan pada table berikut ini :

Tabel I. 4

Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase %
1.	Kepala Desa	1	5,88
2.	Perangkat Desa	4	23,52
3.	PNS	1	5,88
4.	Pensiunan	1	5,88
5.	Wiraswasta	2	11,00
6.	Pegawai Honorer	1	6,67
7.	Ibu Rumah Tangga	7	41,17
Jumlah		17	100,00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa informan lebih banyak dari Ibu Rumah Tangga dari pada instansi pemerintah desa, ini sesuai dengan 4opic yang diteliti yaitu berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan RPJMDes, maka informan lebih dominan dari kalangan Ibu-ibu rumah tangga, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterlibatan mereka pada saat penyusunan RPJMDes lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal ini diharapkan jawaban atau informasi serta data yang peneliti dapat dari informan lebih jelas serta lebih meluas karena informan sendiri yang mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan dalam

penyusunan RPJMdes, karena sebagian dari mereka selalu terlibat dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Wirokerten.

A.5. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table I. 5

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase %
1.	SMA/Sederajat	11	64,71
2.	Diploma	2	11,76
3.	Sarjana S1	4	23,53
Jumlah		17	100,00

Sumber : Data Primer

Dari table di atas menunjukkan bahwa kebanyakan informan yang peneliti wawancara rata-rata berpendidikan SMA, bahkan Ibu-ibu yang diwawancarai juga hampir semua tingkat pendidikan terakhirnya ialah SMA, namun ada juga yang berpendidikan sarjana, laki-laki satu, perempuan tiga orang. Hal ini sangat lah berpengaruh dengan jawaban serta informasi yang mereka berikan pada saat diwawancarai, dengan pendidikan sarjana pengetahuan dan pengalaman serta cara mereka memberikan informasi juga lebih jelas dibandingkan dengan informan yang lainnya. Diharapkan informan yang sudah berpendidikan tinggi mampu memberikan informasi yang tepat dan benar-benar akurat pada penelitian ini, agar bisa membantu peneliti untuk mengetahui persoalan yang sedang diungkapkan oleh peneliti yakni Keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan RPJMDes, peneliti ingin melihat keseharian perempuan di luar tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu juga, dengan pendidikan tinggi serta ilmu dan pengetahuan yang lebih meluas dimiliki oleh informan bisa membantu pemerintah desa serta masyarakat Desa Wirokerten dalam merencanakan sesuatu yang menguntungkan banyak pihak, serta membantu pembangunan di desa wirokerten kearah yang lebih baik, agar kesejahteraan serta keadilan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Desa Wirokerten melalui perempuan selalu di libatkan dalam proses perencanaan.

HALAMAN PENGESAHAN

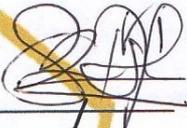
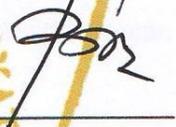
Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Pada hari : Jumat

Tanggal : 15 April 2016

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD"APMD"

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Hastowiyono, MS</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Ir. Muhammad Barori, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. YB. Widyo Hari Mudianto, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sandan, S.IP., M.A.



SURAT KETERANGAN IJIN

070/Reg/VI/170/02/2016

Membaca Surat : **KETUA**

Nomor : **070/II/U/2016**

Tanggal : **5 FEBRUARI 2016**

Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **WINI YULIANTI** NIP/NIM : **12520087**
Alamat : **ILMU PEMERINTAHAN, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA**
Judul : **KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (STUDI PENELITIAN KUALITATIF DI DESA WIROKERTEN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DIY)**
Lokasi : **DESA WIROKERTEN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DIY**
Waktu : **9 FEBRUARI 2016 s/d 9 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **9 FEBRUARI 2016**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Wrs. Tri Mulyono, MM
19620830 198903 1 006

Tembusan:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
- 3 KETUA , SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA
- 4 YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0506 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/W/170/02/2016
Tanggal : 09 Februari 2016 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **WINI YULIANTI**
P. T / Alamat : **STPMD APMD YOGYAKARTA
JL.TIMOHO 317 YOGYAKARTA 55225**
NIP/NIM/No. KTP : **12520087**
Nomor Telp./HP : **082225096496**
Tema/Judul Kegiatan : **KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
Lokasi : **DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**
Waktu : **09 Februari 2016 s/d 09 Mei 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 09 Februari 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid,
Bidang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP.197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Lurah Desa Wirokerten, Kec. Banguntapan
4. Camat Banguntapan
5. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 080/PEM/J/X/2015

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi.

Kepada :

Yth. Drs. Hastowiyono, MS.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WINI YULIANTI
No. Mahasiswa : 12520087
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Pengajuan Judul : 16 Oktober 2015
Judul Proposal : ^{Peran} ~~Partisipasi~~ Perempuan Dalam Proses Penyusunan RPJMDES (Studi Penelitian di Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman).

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Oktober 2015

Ketua

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD
YOGYAKARTA**

- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 070/I/U/2016
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah DIY
Kompleks Kepatihan – Danurejan
Yogyakarta 55213

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan selesai. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : WINI YULIANTI
No Mhs : 12520087
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Tempat : Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY
Judul Skripsi : Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi Penelitian Kualitatif Deskriptif di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY)
Dosen Pembimbing : Drs. Hastowiyono, MS

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 05 Februari 2016



Ketua

Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.

NIY. 170 230 189



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

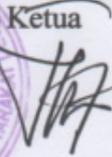
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 050/I/T/2016

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : WINI YULIANTI.
Nomor Mahasiswa : 12520087.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY.
b. Sasaran : Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi Penelitian Kualitatif Deskriptif di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY).
c. Waktu : 05 Februari 2016 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 05 Februari 2016
Ketua

Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.
NIY. 170 230 189

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.